

Tradisi Manyanggar:

Merawat Budaya dan Komunikasi Sosial
di Kabupaten Barito Utara
Bumi Iya Mulik Bengkang Turan

Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tradisi Manyanggar:

Merawat Budaya dan Komunikasi Sosial
di Kabupaten Barito Utara
Bumi Iya Mulik Bengkang Turan

Hakim Syah
Hamdanah
Ajahari
Irfan Wahid



Airlangga
University
Press

■ Pusat Penerbitan dan Percetakan
Universitas Airlangga

~~MATERIAL SANDWICH~~

~~Teori, Desain, dan Aplikasi~~

Achmad Zubaydi, Agung Budipriyanto

ISBN

© Penerbit **Airlangga University Press** 2020

Anggota IKAPI dan APPTI Jawa Timur
Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115
Telp. (031) 5992246, 5992247 Fax. (031) 5992248
E-mail: adm@aup.unair.ac.id

Layout (Laulita)

Cover (Erie Febrianto)

Dicetak oleh:

Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR

AUP 935/05:20 - OC755/12.19/

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak tanpa izin tertulis
dari Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun.

Sambutan Rektor IAIN Palangkaraya

Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag

Atas segala limpahan karunia dan nikmat dari Allah Swt., tidak ada kata yang tepat kecuali puji syukur ke hadirat-Nya. Shalawat dan salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. sebagai suri teladan dalam kehidupan.

Dunia pendidikan tinggi merupakan dunia di mana pengetahuan diproduksi melalui proses-proses akademik atau ilmiah. Hal itu menjadi satu di antara fungsi Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi salah satunya ialah melakukan riset atau penelitian yang bermanfaat bagi keilmuan dan juga kehidupan manusia. Secara pribadi dan juga pimpinan IAIN Palangkaraya, saya merasa berbahagia sekaligus mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini sebagai bentuk upaya memperkaya khazanah keilmuan.

Buku ini merupakan hasil dari riset atau penelitian lapangan para dosen di lingkungan IAIN Palangkaraya dan tentunya patut untuk diapresiasi karena memberikan pengetahuan tentang salah satu tradisi atau budaya (kearifan lokal), yaitu tradisi Manyanggar. Derasnya arus modernisasi dan globalisasi telah memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, namun, tradisi Manyanggar ini sebagai warisan leluhur nenek moyang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat etnik Dayak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, tepatnya di daerah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Terlepas dari kekurangan atau kelemahan yang ada dalam buku ini, apresiasi tentu saja patut diberikan kepada para penulis yang telah mencurahkan segenap pikiran, waktu, dan tenaga serta biaya sehingga buku ini bisa diterbitkan ke sidang pembaca. Para pembaca yang budiman tentunya juga dapat memberikan kritik atau saran yang konstruktif bagi buku ini agar lebih baik.

Prakata

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan karunia-Nya sehingga buku sederhana ini bisa diterbitkan. Buku ini merupakan ikhtiar kecil dalam rangka memperkaya khazanah dan referensi yang secara khusus mengeksplorasi kekayaan kearifan lokal. Melalui sebuah penelitian lapangan yang cukup lama, buku ini memotret salah satu kearifan lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat etnik Dayak yang hidup di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, tepatnya di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Tradisi dimaksud ialah tradisi atau budaya Manyanggar. Tradisi ini merupakan bentuk kearifan lokal di mana dalam praktiknya tradisi ini dapat dijadikan sebagai media komunikasi sosial. Praktik tradisi Manyanggar menghadirkan proses komunikasi simbolik yang memuat nilai-nilai dan falsafah hidup. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, tradisi sebagai bentuk kearifan lokal bagi masyarakat etnik Dayak sendiri masih dianggap penting untuk dilestarikan.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Palangkaraya, Dr.H. Khairil Anwar, M.Ag dan Ketua LP2M IAIN Palangkaraya, Almarhum Dr. H. Jirhanuddin, M.Ag atas ide awalnya bagi penelitian ini dan para informan kunci yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Atas dukungan dan kesempatan yang diberikan untuk berkenan diwawancarai sehingga buku ini bisa diterbitkan dan dihadirkan kepada sidang pembaca.

Ibarat pepatah “tak ada gading yang tak retak”, maka kami pun menyadari sepenuhnya bahwa buku ini tentunya masih terdapat kelemahan di beberapa bagian. Oleh karena itu, kritik dan masukan konstruktif dari sidang pembaca yang budiman sangat dibutuhkan. Akhirnya, dengan senantiasa mengharap rida Allah Swt. Semoga buku sederhana ini dapat memberikan kebermanfaatan, terutama untuk memperkaya pengetahuan kita tentang kearifan lokal.

Palangkaraya, Desember 2019
Penulis

Daftar Isi

v

Sambutan Rektor IAIN
Palangkaraya

07

BAB 02
ETNIK DAYAK
DALAM KAJIAN AKADEMIK

51

BAB 05
MANYANGGAR:
KEARIFAN LOKAL
DAN KOMUNIKASI SOSIAL

Tradisi Manyanggar: Bertahan
di Tengah Arus Modernisasi, 51
Manyanggar sebagai
Media Resolusi Konflik, 63
Manyanggar: Komunikasi Simbolik
dan Representasi Makna, 71

vii

Prakata

11

BAB 03
KEARIFAN LOKAL,
KONFLIK SOSIAL, DAN KOMUNIKASI:
TINJAUAN TEORITIK TRADISI DAN
KEARIFAN LOKAL

Interaksionisme Simbolik, 18
Teori Representasi, 24
Konflik dan Resolusi Konflik, 28

85

BAB 06
PENUTUP

01

BAB 01
PENDAHULUAN

39

BAB 04
KABUPATEN BARITO UTARA:
BUMI IYA MULIK
BENGKANG TURAN

87

Daftar Pustaka

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai sebuah negara-bangsa yang memiliki keragaman dan kekayaan budayanya. Secara faktual ada sekitar 500 kelompok etnis dan 700 bahasa yang menjadikan Indonesia diklaim sebagai sebuah negara yang memiliki budaya paling beranekaragam di planet bumi ini.¹ Keragaman dan kekayaan budayanya tersebut tersebar di semua wilayah kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Realitas keberagaman dan kekayaan budaya tersebut dibalut dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Falsafah ini secara eksplisit tersemat dalam lambang burung garuda Pancasila. Secara historis, falsafah Bhinneka Tunggal Ika sendiri sebenarnya diadaptasi dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular di masa kerajaan Majapahit pada abad ke-14.

Fakta dan realita keberagaman dalam multiaspek ini tentu saja sudah sepatutnya untuk terus dijaga dan dipelihara oleh semua entitas bangsa. Mengapa demikian? sebab di balik keragaman tersebut sesungguhnya juga mengandung potensi konflik yang bisa muncul kapan saja dan di mana saja dengan motif apa saja, terutama ketika konflik diciptakan karena kepentingan politik tertentu.

Catatan sejarah di negeri ini telah menunjukkan secara sah mengenai fakta banyaknya konflik sosial yang pernah terjadi, terutama setelah berakhirnya era Orde Baru. Pelbagai konflik yang terjadi sebenarnya

¹ Dasim Budimansyah, "Pembelajaran Kesadaran Multikultural," dalam Fuad A. Hamied dan Syihabuddin (eds.), *Memelihara Kerukunan Melalui Pendidikan Multikultural*, Jakarta: Kedepuitan Menkokesra, 2009, hal. 287.

tidak muncul dengan sendirinya, namun dipicu atau dipantik oleh beragam faktor seperti ekonomi, politik, agama, ras, dan lain sebagainya. Beberapa konflik sosial sebut saja di antaranya adalah konflik Sambas, konflik Lampung, konflik Sampit, konflik Ambon, konflik Poso, dan konflik Sampang.² Semua konflik sosial yang terjadi tersebut mengakibatkan banyak kerugian tidak hanya berupa materi atau harta benda, tetapi juga berupa nyawa yang tidak sedikit jumlahnya. Konflik dengan disertai tindakan kekerasan memang selalu berakibat traumatik secara psikologis bagi para korban konflik itu sendiri.

Jamak dipahami bahwa sesungguhnya setiap masyarakat pada dasarnya memiliki tradisi atau adat istiadatnya sendiri. Tradisi atau adat istiadat yang ada di setiap masyarakat tentunya memiliki sejarah panjang dan dinamikanya sendiri. Tradisi manyanggar³ merupakan salah satu tradisi yang sampai saat ini masih terus dilestarikan oleh masyarakat Dayak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, khususnya di Muarateweh, Kalimantan Tengah.

Tradisi ini telah berlangsung lama dan turun temurun dari generasi ke generasi. Sebuah bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) yang mengandung atau memiliki nilai-nilai luhur tertentu yang sepatutnya dijaga dan dirawat oleh masyarakatnya, meskipun sebenarnya keberlangsungan hidup sebuah tradisi atau budaya masyarakat juga pada dasarnya dipengaruhi oleh perubahan cara pandang dan sikapnya terhadap tradisi atau budayanya sendiri.

Hal lain yang memengaruhi keberlangsungan hidup sebuah tradisi atau budaya lokal ialah modernitas. Modernitas secara perlahan namun pasti dapat menggerus atau mengikis sendi-sendi kehidupan masyarakat lokal. Masyarakat lokal menjadi kehilangan jati diri dan mengabaikan nilai lokal sebagai pedoman hidup. Sifat kebersamaan luntur perlahan menjadi sikap egoistik yang mementingkan kepentingan pribadi. Dalam konteks inilah, keegoisan yang ditimbulkan dapat menjadi pemicu konflik.

Menurut Sudikan bahwa secara umum kearifan lokal dapat dikaitkan dengan pola kehidupan masyarakat atau komunitas setempat dalam

² Faisal Ismail, *Republik Bhinneka Tunggal Ika*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Kementerian Agama RI, 2012, hal. 108.

³ Kata manyanggar berasal dari bahasa Sangiang (bahasa etnik Dayak) dari akar kata "sanggar" berarti sanggah, menahan, menolak. Lihat Ni Made Ratini, "Upacara Manyanggar Mamapas Lewu Menurut Masyarakat Hindu Kaharingan di Kelurahan Rantau Pulut Kabupaten Seruyan", *Jurnal Belom Bahadat* Vol. V, No. 2 2015, hal. 46.

menjalin hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, individu dengan orang lain sebagai makhluk sosial, individu dengan alam, serta individu dengan Sang Pencipta.⁴ Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab pelbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Sistem pemenuhan kebutuhan mereka meliputi seluruh unsur kehidupan.

Berbicara tentang tradisi tentu saja penting untuk melihatnya melalui cara pandang yang lebih memadai. Tradisi semestinya tidak (lagi) dilihat sebagai produk masa lalu. Sebab tradisi sejatinya bukan hanya milik masa lalu, melainkan juga milik masa kini, dan masa depan. Dengan demikian, tradisi memiliki sifat untuk diciptakan, dan diciptakan kembali, mungkin secara berulang-ulang, apabila keadaan memang membutuhkannya. Menurut WS Rendra seperti dikutip oleh Sobary dalam bukunya, tradisi itu sesungguhnya bukan objek yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula.⁵

Tradisi dalam suatu masyarakat untuk dilihat nilainya bisa ditinjau dari peran dan fungsi dengan pendekatan antropologi. Beberapa nilai seperti nilai religius, nilai moral, nilai edukatif, dan nilai spiritual yang ada di dalam tradisi hanya bisa dilihat dan dikaji dalam bentuk manifestasi dan pada gilirannya kemudian diinterpretasikan atau dimaknai. Dengan pandangan semacam ini, tradisi menjadi akses yang terus ditempuh dari waktu ke waktu untuk menjaga keseimbangan dimensi kosmos alam semesta.

Terkait dengan tradisi itu sendiri, Hasan Hanafi, seorang cendekiawan muslim asal Mesir, memberikan uraian yang penting sebagai berikut:

“Tradisilah yang menentukan bagaimana mereka harus mengonsepsikan alam. Bahkan, tradisilah yang jauh lebih nyata daripada masa kini itu sendiri, sebab kehadirannya bersifat spiritual dan material, abstrak dan sekaligus konkret.”⁶

Bagi masyarakat Dayak di Muara Teweh, sebuah wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Kabupaten Barito Utara, tradisi manyanggar memiliki

⁴ Yasip, “Representasi Kearifan Lokal dalam Babad Tulung Agung,” *Acta Diurna*, Vol 13 No. 1 2017, hal. 52.

⁵ Mohamad Sobary, *Perlawanan Politik dan Puitik Petani Tembakau Temanggung*, Jakarta: KPG, 2016, hal. 60.

⁶ *Ibid.*, hal. 56.

dimensi sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasan Hanafi. Tradisi itu tentu saja bukanlah sesuatu yang kering dari nilai-nilai kehidupan.

Tradisi manyanggar sebagai wujud budaya masyarakat jelas merepresentasikan nilai-nilai tertentu yang dipercayai dan diyakini sekaligus dimaknai oleh para pelakunya sebagai bentuk pengalaman. Dalam konteks ini, sesungguhnya tradisi manyanggar menghadirkan suatu proses komunikasi simbolik. Lebih dari itu, ia juga dapat dijadikan sebagai instrumen atau media resolusi konflik di masyarakat setempat.

Umum dipahami bahwa setiap masyarakat pada prinsipnya memiliki budayanya yang unik dan khas. Ia dilahirkan dari sistem pengetahuan dan kepercayaan masyarakat sendiri. Ia sesungguhnya merupakan produk akal budi manusia. Tradisi manyanggar merupakan tradisi warisan leluhur yang sampai saat ini masih dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat Dayak di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.

Ragam budaya masyarakat di Indonesia pada dasarnya telah lama menjadi obyek kajian yang menarik bagi para peneliti. Suatu kajian akademis yang mendasarinya pada beragam perspektif keilmuan baik sosiologi, antropologi, komunikasi, agama, maupun budaya. Dalam konteks memperkaya khazanah keilmuan, buku ini ditulis dengan menggabungkan beberapa disiplin ilmu atau dengan pendekatan multidisipliner. Dengan pendekatan multidisipliner ini, kajian tentang tradisi manyanggar dipercaya lebih memadai dan komprehensif karena tidak melihatnya dari satu perspektif keilmuan tertentu.

Buku ini secara umum mengkaji atau membahas tiga persoalan mendasar, antara lain mengapa tradisi manyanggar masih dilestarikan oleh masyarakat Dayak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, khususnya di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, mengapa tradisi manyanggar dijadikan sebagai media penyelesaian konflik sosial bagi masyarakat Dayak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, khususnya di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, dan bagaimana masyarakat Dayak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, khususnya di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara memaknai tradisi manyanggar sebagai media resolusi konflik dan juga komunikasi simbolik.

Buku ini ditulis dengan tujuan mendeskripsikan sebuah tradisi etnik Dayak, dalam hal ini tradisi manyanggar, dijadikan sebagai sarana sosial untuk penyelesaian konflik sosial serta menjelaskan pemaknaan masyarakat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, khususnya di Muara Teweh terhadap tradisi manyanggar sebagai media resolusi konflik sosial. Penulisan buku

ini diharapkan juga memberikan pengembangan teoritik multidisipliner dengan temuan yang mengandung nilai kebaruan (*novelty*) sekaligus juga dapat memperkaya kajian akademis tentang etnik Dayak. Secara praktis, buku ini diharapkan juga dapat menjadi bahan rujukan bagi para pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan di pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam bidang sosial dan budaya, utamanya dalam penyelesaian konflik sosial melalui pendekatan budaya lokal atau kearifan lokalnya.

Buku ini ditulis dari hasil penelitian lapangan (*field research*). Sejalan dengan paradigma interpretif sebagai landasan filosofisnya, maka gagasan teoritik yang memiliki keterkaitan dengan paradigma interpretif adalah fenomenologi. Secara konseptual, fenomenologi merupakan studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara bagaimana kita sampai pada pemahaman tentang objek-objek atau kejadian-kejadian yang secara sadar kita alami.

Fenomenologi melihat objek-objek dan peristiwa-peristiwa dari sudut pandang seseorang sebagai *perceiver*. Sebuah *phenomenon* adalah penampakan sebuah objek, peristiwa atau kondisi dalam persepsi individu. Asumsi pokok dari fenomenologi adalah bahwa orang secara aktif akan menginterpretasikan pengalaman mereka dengan memberikan makna terhadap apa yang mereka lihat.⁷

Interpretasi atau *verstehen* (*understanding*) merupakan proses aktif dalam memberikan makna terhadap sesuatu yang diamati seperti misalnya sebuah teks, sebuah tindakan atau suatu situasi yang kesemuanya dapat disebut sebagai pengalaman (*experience*). Karena sebuah pesan atau tindakan lain dapat bermakna banyak hal, maka makna dengan demikian tidak dapat secara sederhana “ditemukan” (*discovered*). Interpretasi, berdasarkan definisinya, merupakan sebuah proses aktif dari pikiran (*mind*), sebuah tindak kreatif dalam mencari pelbagai kemungkinan makna.

Buku ini ditulis untuk memperoleh deskripsi tentang interpretasi atau pemaknaan yang dilakukan masyarakat dalam memahami tradisi manyanggar. Dengan demikian subjeknya merupakan para informan kunci (*key informants*) yang dipercaya mengetahui dan terlibat dalam proses pelaksanaan tradisi manyanggar. Para informan kunci ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

⁷ Noeng Muhadjir, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, hal. 116.

Tabel 1. Deskripsi *Key Subject/Informan*

No.	Subjek/Informan	Kedudukan
1.	Zr	Budayawan
2.	R	ASN Pemkab
3.	AG	Agamawan
4.	TI	Tokoh Masyarakat
5.	SY	Agamawan
6.	Sf	Warga Masyarakat
7.	Mu	DAD Kabupaten Barut
8.	JS	DAD Kabupaten Barut
9.	Is	ASN Dinas Budaya & Pariwisata
10.	Nd	Bupati Kabupaten Barito Utara
11.	Kd	Ketua RT 09 Kel. Jingah
12.	SR	Warga Masyarakat
13.	Er	Warga Masyarakat
14.	Gn	Kanit Bimas Polsek Teweh Tengah
15.	SN	Warga Masyarakat
16.	EG	Damang Desa Hajak
17.	Ju	Warga Masyarakat

Data primer dalam penulisan buku ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan para informan kunci (nama para informan kunci ditulis dengan inisial demi menjaga privasi mereka) dan observasi lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka yang relevan dengan kajian yang dilakukan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode fenomenologi. Kualitas hasil kajian (*goodness criteria*) diukur berdasarkan nilai *authenticity*, yaitu apabila penulis dapat melakukan identifikasi empatik (*emphatic identification*), sebuah tindakan untuk menghidupkan kembali secara psikologis pikiran pelaku (*actor*) guna memahami motif, keyakinan, keinginan, dan pikiran dari pelaku tersebut. Ringkasnya, kualitas hasil kajian ini diukur dari sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial.

Etnik Dayak dalam Kajian Akademik

Pada bab ini dipaparkan kajian pustaka terkait sejumlah literatur ilmiah atau kajian-kajian serta riset-riset sebelumnya yang membahas tentang etnik Dayak. Hal ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh dan memperlihatkan bagaimana posisi buku ini dengan sejumlah referensi ilmiah dan hasil riset-riset sebelumnya yang memiliki relevansi topik.

Gambaran tentang etnik Dayak melalui kajian-kajian ilmiah dan riset sebenarnya cukup banyak. Laksono dkk. (2006) melakukan kajian tentang budaya Betang.⁸ Dalam pandangan mereka, budaya Betang merupakan metafor mengenai kebersamaan dalam hidup sehari-hari orang Dayak yang dulu tinggal di rumah Betang. Dalam tradisi kehidupan orang Dayak masa lalu, rumah Betang bukanlah sekadar tempat bernaung dan berkumpul seluruh anggota keluarga atau untuk melepas keletihan setelah seharian bekerja di ladang. Lebih dari itu, rumah Betang adalah jantung dari struktur sosial dalam kehidupan orang Dayak.

Setiap kehidupan individu dalam rumah tangga dan masyarakat secara sistematis diatur melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam hukum adat. Keamanan bersama, baik dari gangguan kriminal atau berbagi

⁸ P.M. Laksono, dkk., (eds.) *Pergulatan identitas Dayak dan Indonesia: Belajar dari Tjilik Riwut*, Yogyakarta: Galang Press, 2006.

makanan, suka-duka maupun mobilisasi tenaga untuk mengerjakan ladang dijamin keberlangsungannya. Nilai yang menonjol dalam kehidupan di rumah betang adalah nilai kebersamaan (*komunalisme*) di antara para warga yang menghuninya, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang mereka miliki.

Kajian lain dilakukan oleh Sukin (2012) yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fungsi bangunan rumah panjang (betang) bagi masyarakat Desa Saham Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.⁹ Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan teknik observasi langsung ke lapangan yang masih terdapat bangunan rumah panjang (betang) serta teknik wawancara kepada sejumlah informan dan dengan menggunakan metode deskriptif analitik, hasil penelitiannya menemukan bahwa rumah panjang (betang) mempunyai peran penting dalam mengembangkan solidaritas sosial suku Dayak Kanayatn.

Rumah panjang (betang) juga berfungsi untuk mengembangkan kepribadian seseorang melalui proses sosialisasi. Bagi setiap individu, kehidupan dalam rumah panjang merupakan model kehidupan masyarakat Dayak Kayanaytn serta sistem sosial dalam rumah panjang dapat dipertahankan sejauh mana setiap individu menghayati dan memenuhi perannya sesuai dengan apa yang diharapkan darinya. Rumah panjang sebagai wadah sosial merupakan *center for Dayak creation, arts, and inspiration* yang membentuk suku Dayak Kanayatn sekaligus menjunjung tinggi nilai kebudayaan.

Kajian sejenis tentang etnik Dayak juga pernah dilakukan oleh Nugrahaningsih Yosia (2013) berkaitan dengan proses komunikasi masyarakat Dayak Ngaju dalam rangka melestarikan nilai-nilai hidup Huma Betang.¹⁰ Penelitiannya mengambil lokasi pada Rumah Betang Buntoi yang terletak di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi

⁹ Sukin, "Fungsi Bangunan Rumah Panjang (Betang) bagi Masyarakat Desa Saham Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat," skripsi (tidak diterbitkan). Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Salatiga: UKSW., 2012.

¹⁰ Nugrahaningsih Yosia, "Proses Komunikasi Masyarakat Dayak Ngaju Dalam Rangka Melestarikan Nilai-Nilai Hidup Huma Betang. Studi di Lingkungan Masyarakat Dayak Ngaju di Desa Buntoi," tesis (tidak diterbitkan). Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, 2013.

yang terjadi di masyarakat Dayak Ngaju dalam melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Rumah Betang.

Hasil penelitiannya menemukan bahwa nilai-nilai kehidupan yang berkembang di Rumah Betang mencakup: nilai untuk hidup saling tolong menolong, rukun, saling menjaga keamanan serta saling menghargai dan memberi kebebasan beragama. Proses komunikasi masyarakat Dayak Ngaju untuk melestarikan nilai-nilai tersebut ialah dengan melalui proses inkulturasi dan sosialisasi di mana pesan-pesan tersebut disampaikan melalui simbol bahasa verbal dan non-verbal dengan cara interaksi simbolik.

Cara yang paling efektif untuk melakukan transmisi budaya kepada masyarakat Dayak Ngaju di Desa Buntoi ialah dengan melakukan pewarisan secara verbal dibarengi dengan penekanan gerakan non-verbal secara berulang. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Suwarno (2017). Studinya mengangkat topik tentang budaya Huma Betang masyarakat Dayak Kalimantan Tengah dalam globalisasi. *Setting* penelitian di Betang Damang Tumbang Anoi, Kabupaten Gunung Mas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada beberapa nilai budaya dalam masyarakat Dayak pada kehidupan Huma Betang, antara lain *hapsari*, *handep*, *belum bahadat*, dan *hapakat kula*.¹¹

Sejumlah hasil kajian tentang etnik Dayak juga telah diterbitkan menjadi buku di antaranya hasil kajian yang dilakukan oleh Jacobus dan Kanyan (1994) tentang *Rumah Betang sebagai Pusat Kebudayaan Dayak*. Hasil kajiannya diterbitkan oleh Grasindo-LP3S bekerja sama dengan Institute of Dayakology Research and Development. Yekti Maunati (2004) melakukan kajian yang berjudul *Identitas Dayak (Komodifikasi dan Politik Kebudayaan)* yang diterbitkan oleh LKiS, Yogyakarta. Roedy Haryo Widjono (1998) juga melakukan kajian berjudul *Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok* yang telah diterbitkan oleh Grasindo.

Seperti halnya tradisi sosial di banyak tempat yang menjadi objek kajian ilmiah, tradisi manyanggar pun telah mengundang ketertarikan tersendiri bagi para penulis buku ini. Berdasarkan penelusuran ilmiah ditemukan beberapa kajian sebelumnya yang relevan dengan topik buku ini, meskipun dengan pendekatan teoritik atau keilmuan yang berbeda.

¹¹ Suwarno, "Budaya Huma Betang Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah Dalam Globalisasi: Telaah Konstruksi Sosial," dalam Jurnal LINGUA, Vol. 14, No. 1 Maret 2017, hal. 95-99.

Siti Samiah (1988) melakukan penelitian berjudul Upacara Manyanggar di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara.¹²

Penelitiannya lebih memfokuskan pada motif dan keterlibatan masyarakat muslim dalam upacara tersebut. Ni Made Ratini (2015) melakukan penelitian berjudul Upacara Manyanggar Mamapas Lewu Menurut Masyarakat Hindu Kaharingan di Kelurahan Rantau Pulut Kabupaten Seruyan.¹³ Penelitiannya hanya memfokuskan pada upacara tersebut sebagai bentuk ritual masyarakat Hindu Kaharingan.

Dari beberapa kajian tersebut tampaknya tradisi manyanggar masih belum banyak dikaji secara akademis. Oleh karena itu, penulisan buku ini dipandang penting, meskipun memang memiliki topik sejenis dengan beberapa kajian sebelumnya. Penggunaan perspektif dan pendekatan yang berbeda dari kajian sebelumnya setidaknya menjadi faktor penentu dan pembeda. Dalam arti bahwa satu objek atau realitas dunia bisa dikaji dengan beragam pendekatan atau perspektif keilmuan. Oleh karena itu, buku ini ditulis dengan maksud sebagai upaya untuk menyajikan dan mengungkapkan tradisi manyanggar dari perspektif resolusi konflik dan komunikasi simbolik.

¹² Siti Samiah, Upacara Manyanggar di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, Skripsi, 1988. t.d.

¹³ Ni Made Ratini, "Upacara Manyanggar Mamapas Lewu Menurut Masyarakat Hindu Kaharingan di Kelurahan Rantau Pulut Kabupaten Seruyan," Jurnal *Belom Bahadat* Vol. V, No. 2 2015, hal. 43.

Kearifan Lokal, Konflik Sosial, dan Komunikasi: Tinjauan Teoritik

TRADISI DAN KEARIFAN LOKAL

Tradisi pada dasarnya berhubungan erat dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat jaman dulu dan masih terus dilakukan oleh masyarakat sekarang secara turun temurun. Tradisi pada dasarnya memang dilahirkan dari suatu masyarakat. Ruang lingkungannya pun tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai manusia dan kebudayaan dalam perilakunya di masyarakat.¹⁴ Tradisi juga bisa dipahami sebagai pengulangan sadar atas sikap paradigmatik tertentu untuk mengungkapkan ontologi manusia, baik pada alam semesta maupun Tuhan.¹⁵

Tradisi dalam kajian antropologi diidentikkan sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan,

¹⁴ Slamet Subiantoro. 2010. *Antropologi Seni Rupa: Teori, Metode & Contoh Telaah Analitis*. Surakarta: UNS Press, hal. 39.

¹⁵ Miracle Eliade. 2002. *Mitos Gerakan Kembali Yang Abadi: Kosmos dan Sejarah (The Myth of the Eternal or Cosmos and History)* Terj. Cuk Ananta. Yogyakarta: Ikon Teralitera, hal. 4.

dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Sedangkan dalam kamus sosiologi, tradisi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.¹⁶

Tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu, namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak.

Tradisi juga dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.¹⁷ Kriteria tradisi itu sendiri dapat lebih dibatasi dengan mempersempit cakupannya. Dalam pengertian ini tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yakni tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan masa kini. Dilihat dari aspek gagasan, tradisi bisa dilihat dengan adanya keyakinan, kepercayaan, simbol-simbol, nilai, aturan, dan ideologi yang kesemuanya itu merupakan peninggalan masa lalu yang hingga kini masih dilestarikan.

Tradisi juga dapat diartikan sebagai suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun. Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa tradisi adalah apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya dapat dikatakan sebagai tradisi.¹⁸

Tradisi lahir melalui dua cara. *Pertama*, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Atas dasar suatu alasan tertentu, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara, memengaruhi rakyat banyak.

Sikap takzim dan kagum itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian, dan pemugaran peninggalan purbakala serta

¹⁶ Soekanto, *Kamus Sosiologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 459

¹⁷ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007, hal 70

¹⁸ Dadang Supardan. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hal. 207

menafsirkan ulang keyakinan lama. Semua keyakinan itu memperkokoh sikap kekaguman dan tindakan individual menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial sesungguhnya.

Kedua, muncul dari atas melalui paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.¹⁹ Shils menjelaskan suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti “onggokan” gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.

Fungsi kedua dari tradisi adalah memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meskipun dengan risiko yang paradoksal, yakni bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.

Selanjutnya fungsi tradisi adalah menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.

Kemudian fungsi tradisi diantaranya adalah membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan apabila masyarakat berada dalam krisis.²⁰

¹⁹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007, hal. 71–72

²⁰ *Ibid*, hal. 74–75

Tradisi adalah roh dari sebuah kebudayaan. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Jika tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir saat itu juga.

Setiap sesuatu menjadi tradisi seringkali sudah teruji tingkat efektivitasnya dan tingkat efisiensinya. Efektivitas dan efisiensinya selalu mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam mengatasi persoalan jika tingkat efektivitas dan efisiennya rendah akan segera ditinggalkan oleh pelakunya dan tidak akan menjadi sebuah tradisi. Tentu saja suatu tradisi akan menjadi pas dan cocok sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang mewarisinya.

Lain halnya dengan apa yang dipahami oleh Lévi-Strauss. Ia memahami tradisi sebagai bentuk pengetahuan dalam suatu masyarakat yang diwujudkan dalam kebiasaan untuk memecahkan persoalan tertentu ataupun untuk merayakan hal tertentu.²¹ Pengetahuan ini biasanya memiliki dasar kebenaran, baik secara mistis maupun rasional dengan mampu menjawab persoalan yang dihadapi. Tradisi, dalam hal ini, terkait juga dengan interpretasi atau pemaknaan sebuah masyarakat dalam melihat realitas untuk disikapi dengan keyakinan dan kepercayaan.

Mitos, legenda, epos, sejarah nyata yang pernah terjadi dan refleksi seorang tokoh atas kehidupan yang saat itu sedang menjadi persoalan merupakan variabel-variabel pembentuk tradisi itu sendiri. Wujud tradisi pun bermacam-macam. Mulai dari upacara keagamaan, upacara pernikahan, upacara kematian, upacara kelahiran, perayaan hari-hari tertentu, hingga tradisi dalam wujud kesenian.

Lazimnya, aneka macam tradisi tersebut antara daerah satu dan daerah lainnya memiliki pola yang mirip, namun juga ada sedikit perbedaannya. Hal itu juga terkait erat dengan pengetahuan yang ada di masyarakat tersebut dan memiliki dasar makna dan filosofi tersendiri yang tentunya tidak bisa disamakan.

Menurut Lévi-Strauss, seorang antropolog, tradisi dapat menjadi representasi dari pengetahuan suatu masyarakat.²² Hal ini karena di balik tradisi sesungguhnya selalu tersimpan makna dan pandangan dunia. Dalam konteks ini, penduduk atau masyarakat Dayak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Muarateweh, Kalimantan Tengah juga memiliki

²¹ Claude Lévi-Strauss. 2005. *Antropologi Struktural (Anthropologie Structurale)* Terj. Ninik Rochani Sjams. Yogyakarta: Kreasi Wacana, hal. 30–32.

²² *Ibid.*

aneka macam tradisi yang khas dan unik. Salah satunya ialah tradisi manyanggar.

Tradisi manyanggar ini diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan sampai saat ini masih terus dilestarikan dengan baik. Oleh karena itu, tradisi ini dapat digolongkan ke dalam bentuk folklor. Menurut Danandjaja, folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat.²³

Sedangkan menurut John Harold Bruvant seperti dikutip oleh Danandjaja, berdasarkan tipenya *folklor* dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, antara lain sebagai berikut.

1. *Folklor* lisan, yaitu *folklor* yang bentuknya murni lisan, misalnya ungkapan tradisional, pertanyaan tradisional, cerita prosa rakyat, dan nyanyian rakyat.
2. *Folklor* sebagian lisan, yaitu *folklor* yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan, misalnya kepercayaan rakyat, permainan rakyat, adat istiadat, upacara, dan pesta rakyat.
3. *Folklor* bukan lisan, yaitu *folklor* yang bentuknya bukan lisan walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. *Folklor* ini ada yang berbentuk material dan non-material. *Folklor* material bisa berbentuk kerajinan tangan, arsitektur rakyat, pakaian dan perhiasan adat, makanan, alat musik, dan senjata.²⁴

Berdasarkan penggolongan *folklor* di atas maka tradisi atau budaya manyanggar dapat dikategorikan termasuk *folklor* sebagian lisan. Alasannya adalah karena di dalamnya terdapat *folklor* lisan, yaitu doa-doa yang digunakan dalam upacara dan juga terdapat bentuk *folklor* bukan lisan berupa benda-benda tertentu yang disediakan dalam upacara tersebut.

Tradisi atau budaya lokal yang secara umum dijumpai di masyarakat sering pula diidentikkan dengan istilah kearifan lokal (*local wisdom*). Secara kamus, kearifan lokal merupakan frase yang terdiri dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal. Menurut *Oxford Dictionary, Fourth Edition*, Oxford

²³ James Danandjaja, *Folklor Indonesia; Ilmu Gosip, Dongeng dan lain-lain*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997, hal. 2.

²⁴ Ibid.

University Press (2008), *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* berarti kebijaksanaan.

Sedangkan secara umum kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam disiplin antropologi, kearifan lokal sendiri dikenal dengan istilah *local genius*. *Local genius* ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales.²⁵

Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan berupa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab pelbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Sistem pemenuhan kebutuhan mereka meliputi seluruh unsur kehidupan.

Kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal di sini adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain.

Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus). Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal meliputi cinta kepada Tuhan, alam semesta beserta isinya, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, jujur, hormat dan santun, kasih sayang dan peduli, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan persatuan.

Jadi kearifan lokal merupakan tata aturan tidak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan berupa tata aturan yang menyangkut hubungan antarsesama manusia, misalnya dalam interaksi sosial baik antarindividu maupun kelompok, yang berkaitan dengan hierarki dalam pemerintahan dan adat, aturan perkawinan antarklan, dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari.

Kearifan lokal diungkapkan dalam bentuk kata-kata bijak (falsafah) berupa nasehat, pepatah, pantun, syair, *folklore* (cerita lisan) dan sebagainya; aturan, prinsip, norma dan tata aturan sosial dan moral yang menjadi sistem sosial; ritus, seremonial atau upacara tradisi dan ritual;

²⁵ Ni Wayan Sartini, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara; Sebuah Kajian Filsafat" (Jurnal), Yogyakarta: UGM, 2004, hal. 111.

serta kebiasaan yang terlihat dalam perilaku sehari-hari dalam pergaulan sosial. Cerita rakyat banyak mengandung amanat-amanat kepada warga.

Ada beragam ciri dari kearifan lokal, antara lain sebagai berikut: warisan, sejatinya, kearifan lokal yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat adalah bentuk warisan peradaban yang dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi. Kearifan lokal ini bisa dikatakan contoh kebudayaan di Indonesia yang memberikan nilai dan norma dalam kehidupan manusia.

Pengendalian sosial, ciri kedua yang melekat pada kearifan lokal ini adalah anggapan bahwa kehidupan manusia akan mampu untuk mengendalikan berbagai pengaruh dari luar. Pengaruh ini bisa disebabkan karena adanya tekanan dari globalisasi di dalam kehidupan masyarakat.

Dekat dengan nilai dan moral masyarakat, ciri ketiga dari kearifan lokal biasanya adalah karakteristiknya yang menyangkut nilai dan moral pada masyarakat setempat. Keadaan ini disesuaikan dengan rutinitas dalam kehidupan masyarakat, dengan adanya adat dan kebiasaan masyarakat akan menganggapnya sebagai aturan.

Ciri lain dari kearifan lokal yang penting diketahui adalah tidak tertulis, namun tetap diakui sebagai kekayaan dalam berbagai segi pandangan hukum. Ciri ini diungkapkan sebagai wawasan bahwa kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat sebagai salah satu unsur kebudayaan.

Adapun dimensi kearifan lokal dalam pandangan Ife,²⁶ pada prinsipnya memiliki enam bentuk atau dimensi, antara lain sebagai berikut.

1. Dimensi pengetahuan lokal. Setiap masyarakat di mana pun mereka berada selalu memiliki pengetahuan lokal yang terkait dengan lingkungan hidupnya. Pengetahuan lokal ini terkait dengan pengalaman masyarakat tersebut, tentang kebutuhan dan masalah-masalahnya, kekuatan dan kelebihannya, dan ciri-ciri khasnya.
2. Dimensi nilai lokal. Untuk mengatur kehidupan bersama antara warga masyarakat, maka setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya. Nilai-nilai ini biasanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam.

²⁶ Jim Ife. *Community Development. Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hal. 242–260.

3. Dimensi keterampilan lokal. Keterampilan lokal bagi setiap masyarakat digunakan sebagai kemampuan bertahan hidup (*survival*). Keterampilan lokal dari yang paling sederhana seperti berburu, meramu, bercocok tanam hingga membuat industri rumah tangga.
4. Dimensi sumber daya lokal. Sumber daya lokal pada umumnya adalah sumber daya alam, yaitu sumber daya yang tidak terbaru dan sumber daya yang dapat diperbarui.
5. Dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal. Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut dengan pemerintahan kesukuan. Umum diketahui bahwa setiap masyarakat di mana pun berada sesungguhnya mempunyai atau memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang melakukannya secara demokratis atau duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Ada juga masyarakat yang melakukannya secara hierarkis, bertingkat atau berjenjang.
6. Dimensi solidaritas kelompok lokal. Masyarakat biasanya dipersatukan oleh ikatan komunal untuk membentuk solidaritas lokal. Setiap masyarakat mempunyai media-media untuk mengikat warganya dapat dilakukan melalui ritual keagamaan atau acara dan upacara adat lainnya.

Dari beberapa dimensi kearifan lokal sebagaimana dikemukakan oleh Ife tersebut, tradisi atau budaya manyanggar dengan demikian merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) yang dimiliki oleh masyarakat Dayak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara. Alasannya karena di dalam tradisi atau budaya manyanggar sesungguhnya mencakup keenam dimensi kearifan lokal seperti diungkapkan oleh Ife.

INTERAKSIONISME SIMBOLIK

Melalui simbol-simbol manusia berkemampuan merangsang orang lain dengan cara-cara yang mungkin berbeda dari rangsangan yang diterimanya dari orang lain itu. Untuk memahami asumsi ini perlu dikemukakan pendapat Mead yang membedakan antara tanda-tanda alamiah (*natural signs*) dan simbol-simbol yang mengandung makna (*significant symbols*). *Natural signs* bersifat naluriah serta menimbulkan reaksi yang sama bagi setiap orang contohnya air bagi orang yang haus.

Significant symbols tidak harus menimbulkan reaksi yang sama bagi setiap orang. Aktor yang memakai simbol tertentu memberikan arti terhadap simbol tersebut dalam pikirannya, namun si penerima simbol belum tentu menghubungkannya dengan arti yang sama kepadanya. Satu hal yang perlu menjadi perhatian di sini adalah bawa simbol komunikasi merupakan proses dua arah di mana kedua pihak saling memberikan makna atau arti terhadap simbol-simbol itu.

Interaksi antarmanusia dalam komunitasnya baik skala kecil maupun skala besar pada dasarnya berlangsung melalui komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Interaksi simbolik dibutuhkan karena dalam kehidupannya, manusia tidak setiap waktu bisa berkomunikasi secara langsung dan aktual. Dalam hal ini, teori interaksionisme simbolik digagas atau dimunculkan oleh George Herbert Mead (1934) dan para penganut teori ini. Teori ini sesungguhnya lahir dari tradisi sosiokultural.²⁷

Pokok perhatian interaksionisme simbolik yaitu, dampak makna dan simbol pada tindakan dan interaksi manusia. Manusia mempelajari simbol-simbol dan juga makna di dalam interaksi sosial. Makna dan simbol memberi karakteristik khusus pada tindakan sosial dan interaksi sosial.

Orang sering menggunakan simbol untuk mengomunikasikan sesuatu tentang diri mereka, misalnya mengomunikasikan gaya hidup tertentu. Simbol sangat penting dalam memungkinkan orang bertindak di dalam cara-cara manusiawi yang khas. Selain kegunaan umum tersebut, simbol-simbol pada umumnya dan bahasa pada khususnya mempunyai sebuah fungsi.

George Herbert Mead menyatakan bahwa komunikasi manusia berlangsung melalui pertukaran simbol serta pemaknaan simbol-simbol tersebut. Mead menempatkan arti penting komunikasi dalam konsep tentang perilaku manusia, serta mengembangkan konsep interaksi simbolik bertolak pada pemikiran Simmel yang melihat persoalan pokok sosiologi adalah masalah sosial. Mead adalah salah satu pelopor dalam filsafat pragmatisme di mana pragmatisme menekankan hubungan yang sangat erat antara pengetahuan dan tindakan untuk mengatasi masalah sosial.

Mead melihat bahwa komunikasi antarindividu adalah sebagai inti dari pembentukan kepribadian manusia itu. Dengan kata lain, kepribadian

²⁷ Robert T. Craig dan Heidi L. Muller, *Theorizing Communication, Readings Across Traditions*, USA: Sage Publications, 2007, hal. 365.

individu dibentuk melalui komunikasi dengan orang lain serta citra diri dibangun melalui sarana interaksi dengan orang lain.

Mead mengemukakan bahwa dalam teori Interaksionisme Simbolik, ide dasarnya adalah sebuah simbol, karena simbol ini adalah suatu konsep mulia yang membedakan manusia dari binatang. Simbol ini muncul akibat dari kebutuhan setiap individu untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam proses berinteraksi tersebut pasti ada suatu tindakan atau perbuatan yang diawali dengan pemikiran. Dalam tinjauannya di buku *Mind, Self and Society*, Mead berpendapat bahwa bukan pikiran yang pertama kali muncul, melainkan masyarakatlah yang terlebih dulu muncul dan baru diikuti pemikiran yang muncul pada dalam diri masyarakat tersebut.

Blumer, salah seorang pengembang teori ini, menyatakan bahwa tindakan manusia terhadap manusia lain atau benda berdasarkan pengertian yang mereka terima tentang orang atau benda tersebut.²⁸ Interaksi simbolik muncul dari interaksi sosial bersama orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, pengertian atau makna tidak muncul dari sebuah objek atau benda, melainkan dari bahasa yang manusia gunakan. Dalam konteks ini, bahasa menjadi sarana penting dalam proses pemaknaan atas objek atau simbol-simbol tertentu.

Menurut Blumer, pokok pikiran interaksi simbolik ada 3 yakni bahwa manusia bertindak (*act*) terhadap sesuatu (*thing*) atas dasar makna (*meaning*). Makna itu berasal dari interaksi sosial seseorang dengan sesamanya.

Makna itu diperlukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran (*interpretative proceses*), yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Intinya, Blumer berpendapat bahwa makna yang muncul dari interaksi tersebut tidak begitu saja diterima seseorang, kecuali setelah individu itu menafsirkannya terlebih dulu.

Interaksionisme simbolik Blumer merujuk pada suatu karakter interaksi khusus yang berlangsung antarmanusia. Aktor tidak semata-mata bereaksi terhadap tindakan yang lain, tetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain. Respon aktor selalu didasarkan atas penilaian makna tersebut dan interaksi pada manusia dijumpainya oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran atau menemukan makna tindakan orang lain.

²⁸ H. Blumer, *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*, 1968. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Pokok-pokok pendekatan interaksi simbolik yang diungkapkan pada konsep Blumer adalah "...masyarakat terdiri dari individu-individu yang memiliki kedirian mereka sendiri (yakni membuat indikasi untuk diri mereka sendiri), tindakan individu itu merupakan suatu konstruksi dan bukan sesuatu yang lepas begitu saja, yakni keberadaannya dibangun oleh individu melalui catatan dan penafsiran situasi di mana dia bertindak, sehingga kelompok atau tindakan kolektif itu terdiri dari beberapa susunan tindakan individu yang disebabkan oleh penafsiran individu/pertimbangan individu terhadap setiap tindakan yang lainnya.

Ada beberapa konsep dasar dari teori interaksionisme simbolik yang perlu dipahami. *Pertama*, pentingnya makna bagi perilaku manusia. Konsep ini mendukung tiga asumsi interaksionisme simbolik seperti diungkapkan oleh Blumer sebagai berikut.

1. Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. Asumsi ini menjelaskan perilaku sebagai suatu rangkaian pemikiran dan perilaku yang dilakukan secara sadar antara rangsangan dan respons orang berkaitan dengan rangsangan tersebut. Makna yang diberikan pada simbol merupakan produk dari interaksi sosial dan menggambarkan kesepakatan untuk menerapkan makna tertentu pada simbol tertentu pula.
2. Makna diciptakan dalam interaksi antarmanusia. Menurut Blumer, ada tiga cara untuk menjelaskan asal sebuah makna.
 - a. Makna adalah sesuatu yang bersifat intrinsik dari suatu benda.
 - b. Asal usul makna melihat makna itu.
 - c. Makna sebagai sesuatu yang terjadi di antara orang-orang. Makna adalah "produk sosial" atau "ciptaan yang dibentuk dalam dan melalui pendefinisian aktivitas atau tindakan manusia ketika mereka berinteraksi."
3. Makna dimodifikasi melalui proses interpretasi. Blumer sendiri menyatakan bahwa proses interpretasi ini memiliki dua langkah, yaitu para pelaku atau aktor menentukan benda-benda yang mempunyai makna dan melibatkan pelaku untuk memilih, mengecek, dan melakukan transformasi makna di dalam konteks di mana mereka berada.²⁹

²⁹ Richard West dan Lynn H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi, Analisis dan Aplikasi*. Terj. Maria Natalia Damayanti Maer, Jakarta: Salemba Humanika, 2009, hal. 98–100.

Kedua, pentingnya konsep diri. Menurut Blumer, manusia bukan sekadar organisme saja yang bergerak di bawah pengaruh baik dari luar maupun dari dalam, namun organisme yang sadar akan dirinya. Karena seorang diri, maka mampu memandang diri sebagai objek pikirannya dan bergaul atau berinteraksi dengan diri sendiri.³⁰

Ketiga, konsep hubungan antara individu dan masyarakat. Konsep ini berkaitan dengan hubungan antara kebebasan individu dan batasan sosial. Mead dan Blumer menjelaskan mengenai keteraturan dan perubahan dalam proses sosial. Orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Asumsi ini mengakui bahwa norma-norma sosial membatasi perilaku individu dan struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial.

Teori interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh Blumer mendasari pada tiga premis utama. *Pertama*, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka, *kedua*, makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial dengan orang lain, *ketiga*, makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial sedang berlangsung.³¹

Pendukung teori interaksionisme simbolik seperti Blummer, Mead dan Goffman telah berusaha mencari dan merumuskan prinsip-prinsip dasar dari teori ini. Beberapa prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Kemampuan untuk berpikir

Asumsi penting bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berpikir membedakan interaksionisme simbolik dari akarnya, behaviorisme. Behaviorisme mempelajari tingkah laku manusia secara obyektif dari luar. Sedangkan interaksionisme simbolik mempelajari tindakan sosial dengan menggunakan teknik introspeksi untuk dapat mengetahui sesuatu yang melatarbelakangi tindakan sosial dari sudut pandang sang aktor. Asumsi ini juga memberikan dasar yang kuat bagi orientasi teoritis kepada interaksionisme simbolik.

Para pendukung teori ini berpendapat bahwa individu-individu di dalam masyarakat tidak dipandang sebagai makhluk yang dimotivasi oleh faktor-faktor yang bersifat eksternal yang berada di luar kontrol mereka. Sebaliknya, mereka melihat manusia sebagai makhluk yang

³⁰ Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, hal. 197.

³¹ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 258–259.

reflektif dan oleh sebab itu manusia sanggup bertindak laku secara reflektif pula.

Kemampuan untuk berpikir itu berada di dalam akal budi, yang oleh pendukung interaksionisme simbolik dibedakan dari otak. Manusia wajib memiliki otak agar dapat mengembangkan akal budinya, namun otak tidak serta merta dapat menciptakan akal budi.

2. Berpikir dan berinteraksi

Seseorang hanya memiliki kemampuan untuk berpikir yang bersifat umum. Kemampuan ini harus dibentuk dalam proses interaksi sosial. Pandangan ini mengantarkan interaksionisme simbolik untuk memerhatikan satu bentuk khusus dari interaksi sosial, yakni sosialisasi.

Kemampuan manusia untuk berpikir sudah dibentuk ketika sosialisasi pada masa anak-anak dan berkembang selama sosialisasi ketika manusia menjadi dewasa. Interaksionisme simbolik melihat sosialisasi adalah proses yang bersifat dinamis. Di dalam proses itu, manusia tidak hanya menerima informasi, namun ia juga menginterpretasi dan menyesuaikan informasi itu sesuai dengan kebutuhannya.

Tentu saja interaksionisme simbolik tidak hanya tertarik pada sosialisasi saja, tetapi juga interaksi pada umumnya. Interaksi adalah suatu proses di mana kemampuan untuk berpikir dikembangkan dan diungkapkan. Segala macam interaksi menyaring kemampuan kita untuk berpikir. Lebih dari itu, berpikir memengaruhi seseorang dalam bertindak laku. Dalam kebanyakan tingkah laku, seorang aktor harus memperhitungkan orang lain dan memutuskan bagaimana harus bertindak laku agar cocok dengan orang lain.

Pentingnya proses berpikir bagi interaksionisme simbolik tampak pada pandangan terhadap objek. Blumer misalnya, membedakan objek menjadi tiga macam seperti yang telah dibahas sebelumnya. Objek-objek tersebut tidak lebih dari benda yang berada di luar (*outer*), namun mereka memiliki arti penting ketika mereka didefinisikan oleh seorang aktor. Sebatang pohon mempunyai arti yang berbeda untuk seorang seniman, penyair, petani, tokoh agama, atau tukang kayu.

Individu-individu mempelajari arti dari objek tersebut selama proses sosialisasi. Kebanyakan kita mempelajari arti yang serupa dari beberapa objek, tetapi dalam hal tertentu kita pun bisa memberikan arti yang berbeda kepada objek yang sama. Hal itu tidak berarti

bahwa interaksionisme simbolik menyangkal atau tidak mengakui esensi dari objek tersebut. Selembar kertas tetap menjadi selembar kertas dalam artian biasa. Apa yang membedakan arti dari selembar kertas tersebut adalah cara pandang yang berlainan dari orang yang memandangnya.

3. Pembelajaran makna simbol-simbol

Arti tidak berasal dari proses kegiatan mental, tetapi dari proses interaksi. Pendapat seperti ini berasal dari pragmatisme Mead yang memusatkan perhatiannya pada aksi dan interaksi manusia dan bukannya pada kegiatan mental yang terisolir. Substansinya ialah bukan bagaimana orang secara psikologis menciptakan arti-arti, tetapi bagaimana mempelajari arti-arti yang terdapat dalam masyarakat.

Dalam interaksi sosial, orang-orang belajar simbol dan arti. Mereka harus berpikir terlebih dulu sebelum memberikan simbol tertentu. Simbol adalah objek sosial yang digunakan untuk mewakili apa saja yang disepakati untuk diwakilinya. Misalnya, bendera merah putih disepakati sebagai simbol bangsa Indonesia. Objek-objek yang merupakan simbol selalu memiliki arti yang berbeda dari apa yang tampak di dalam objek itu sendiri. Pendukung teori interaksionisme simbolik menganggap bahasa sebagai sistem simbol yang mahabesar. Kata-kata adalah simbol karena mereka menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Kata-kata memungkinkan terciptanya simbol yang lain.

Dengan demikian, perangkat teoritik interaksionisme simbolik ini tentu saja dipandang relevan untuk melihat lebih dalam tentang tradisi atau budaya manyanggar di masyarakat Dayak, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Tradisi ini dalam praktiknya sesungguhnya juga merepresentasikan simbol-simbol tertentu yang bermuatan makna. Dengan kata lain, dalam tradisi manyanggar terjadi proses komunikasi simbolik.

Teori Representasi

Teori ini berkembang dari pemikiran para filsuf realis dalam upayanya untuk merumuskan proposisi yang benar tentang materi. Para filsuf realis ternyata hanya berhasil merumuskan tentang materi sampai batas proposisi empiris yang bersifat tergantung (*contingent*), itu pun hanya sampai pada batas materi eksis, sedangkan proposisi *a priori* yang benar bersifat niscaya (*necessary*) mengalami kebuntuan.

Representasi yaitu bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apa pun ditampilkan dan digambarkan dalam teks. Representasi juga menunjuk pada bagaimana seseorang, satu kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan dalam teks. Stuart Hall mengatakan bahwa *representation is the production of meaning through language*. Representasi adalah produksi dari makna bahasa, yang mana representasi membentuk argumen, menggunakan tanda-tanda yang diorganisasikan ke dalam bahasa-bahasa dari berbagai jenis untuk mengomunikasikan atau menyampaikan makna tersebut kepada orang lain.

Representasi bukan penjiplakan atas kenyataan yang sesungguhnya, representasi adalah ekspresi estetis, rekonstruksi dari situasi sesungguhnya. Representasi berarti adalah salah satu praktek saling memproduksi kebudayaan, representasi adalah suatu konsep yang sangat luas. Bahasa medium yang menjadi suatu perantara dalam pemaknaan sesuatu lewat bahasa (dalam hal ini simbol-simbol dan tanda tertulis, lisan atau gambar) yang mengungkapkan suatu pikiran, konsep dan ide-ide tentang sesuatu. Makna merupakan hal yang tidak lepas dari cara individu menginterpretasikan.

Dengan keterbatasan pemikiran para filsuf realis tersebut, Mc Teggart, filsuf modern dari Cambridge, berargumentasi bahwa semua peristiwa memiliki karakter “kelampauan” (telah berhenti mengada), “kekinian” (ada riil), dan “keakanan” (kemungkinan belum eksis).³² Terhadap hal-hal yang telah berhenti mengada dan kemungkinan mengada, para filsuf realis mengalami kesulitan mengatakan. Mereka hanya bisa mengatakan “saya melihat kemarin.”

Terhadap keterbatasan tersebut, para filsuf realis memang mengakui analogi yang menyatakan, bahwa orang-orang tidak bisa menjadi murid tanpa adanya guru, juga objek-objek fisik tidak menjadi objek tanpa adanya suatu subjek. Namun, mereka masih berusaha menunjukkan bahwa analogi itu masih memiliki ruang kosong karena benda-benda fisik tetap saja eksis tanpa subjek, sebagaimana juga orang-orang masih tetap eksis tanpa guru.

Ewing menjelaskan tentang pemahaman tersebut sebagai berikut. Tidak ada hal yang lebih jelas, setidaknya bagi kalangan di luar bidang filsafat, yakni eksistensi benda-benda fisik. Namun, sebagian besar

³² A.C. Ewing, *Persoalan-persoalan Mendasar Filsafat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal. 249.

filosof akan berpandangan bahwa sebenarnya kita menyadarinya secara langsung dan tentunya ada argumen-argumen berbobot yang mendukung kesimpulan seperti itu karena beberapa hal berikut.

1. Bukti empiris sangat mendukung pandangan bahwa apa yang dipersepsikan, paling tidak sifat-sifatnya, di antaranya tergantung pada organ-organ indera kita. Untuk dapat melihat bintang kita tidak harus melihat ke langit di kegelapan malam, melainkan cukup dengan menerima pukulan di kepala kita.
2. Apa yang kita persepsikan secara langsung agaknya kita persepsikan sebagaimana adanya, namun terhadap benda-benda fisik kita umumnya tidak mempersepsikan sebagaimana adanya. Ini seakan-akan membuktikan fakta adanya ilusi. Lebih lanjut lagi, dua orang berbeda yang melihat benda yang sama di saat yang sama dari posisi ruang yang berbeda bisa jadi melihat benda itu secara berbeda, misalnya memiliki bentuk yang berbeda.³³ Argumen semacam itu menimbulkan pembentukan teori yang umum dikenal sebagai teori representatif tentang persepsi.

Representasi adalah tindakan menghadirkan atau merepresentasikan sesuatu baik orang, peristiwa, maupun objek lewat sesuatu yang lain di luar dirinya dan biasanya berupa tanda atau simbol.³⁴ Representasi ini belum tentu bersifat nyata, tetapi bisa juga menunjukkan dunia khayalan, fantasi, dan ide-ide abstrak. Stuart Hall menyatakan bahwa “*representation connect meaning and language to culture.... representation is an essential part of the process by which meaning is produced and exchanged between members of culture.*”

Menurut Hall, proses produksi dan pertukaran makna antara manusia atau antarbudaya yang menggunakan gambar, simbol dan bahasa adalah disebut representasi. Dikatakan pula oleh Stuart Hall bahwa representasi adalah konstruksi makna yang diproduksi melalui bahasa dengan menggunakan simbol-simbol yang manifestasinya bukan hanya melalui isyarat-isyarat verbal, tetapi juga visual. Dalam hal ini, Hall membedakan tiga pendekatan dalam sistem representasi, yakni pendekatan reflektif, pendekatan intensional, dan pendekatan konstruksionis.

³³ Ibid., hal. 103.

³⁴ Stuart Hall et al. eds. (1980). *Culture, Media, Language*. London: Hutchinson, hal. 28.

Pendekatan reflektif menyatakan bahwa makna terdapat pada objek, orang, ide-ide ataupun kejadian-kejadian dalam kehidupan nyata. Bahasa dalam hal ini, berfungsi seperti cermin, merefleksikan makna sebenarnya yang ada di dunia. Dalam pendekatan ini bahasa bekerja dengan refleksi atau peniruan sederhana tentang kebenaran yang telah ada atau sering disebut atau diistilahkan dengan *mimetic*.

Pendekatan intensional menyatakan bahwa bahasa dan fenomenanya memiliki pemaknaan atas pribadi penyampainya. Ia tidak merefleksikan, tetapi berdiri atas dirinya dengan segala pemaknaannya. Setiap individu sebenarnya memiliki sisi yang unik dalam memaknai segala sesuatu lewat sistem bahasa.

Sementara itu, pendekatan konstruksionis membaca publik dan karakter sosial sebagai bahasa. Ia memperhitungkan bahwa interaksi antarsosial yang dibangunnya justru akan bisa mengonstruksi sosial yang ada. Dalam pendekatan ini bahasa dan pengguna bahasa tidaklah bisa menetapkan makna lewat dirinya sendiri. Ia harus dihadapkan dengan sesuatu yang lain sehingga memunculkan apa yang disebut dengan interpretasi atau pemaknaan.

Sementara itu, Marcel Danesi mendefinisikan representasi sebagai proses perekaman gagasan, pengetahuan, atau pesan secara fisik.³⁵ Lebih tepatnya representasi dapat didefinisikan atau diartikan sebagai penggunaan "tanda-tanda" (gambar, suara, dan sebagainya) untuk menampilkan ulang sesuatu yang diserap, diindra, dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik.

Sementara itu, Judy Giles dan Tim Middleton, membagi tiga definisi representasi dari kata "*to represent*" sebagai berikut.

1. *To stand in for*, hal ini dapat dicontohkan dalam kasus bendera suatu negara, yang jika dikibarkan dalam suatu *event* olahraga maka bendera tersebut menandakan keberadaan negara yang bersangkutan dalam *event* tersebut.
2. *To speak or act on behalf of*, contoh kasusnya adalah Paus menjadi orang yang berbicara dan bertindak atas nama umat Katolik
3. *To represent*. Dalam arti ini, misalnya tulisan sejarah atau biografi yang dapat menghadirkan kembali kejadian-kejadian di masa lalu.³⁶

³⁵ Ahmad Nurzakiah, *Representasi Maskulinitas*, Jakarta: FIB UI, 2009, hal. 25.

³⁶ Ibid.

Konflik dan Resolusi Konflik

Secara umum istilah konflik sudah acap kali didengar. Istilah ini sangat populer dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial pastinya pernah mengalami konflik dalam hubungan sosial dengan manusia lain. Konflik bisa dikatakan merupakan bagian dari hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Sejarah kenabian Adam seperti termaktub di dalam kitab suci setidaknya menguatkan argumentasi bahwa konflik memang sesuatu yang selalu menyertai perjalanan kehidupan manusia.

Konflik berasal dari bahasa latin *conflintus* yang berarti pertentangan, perwujudan dan pelaksanaan beraneka pertentangan antara dua pihak yang dapat merumuskan dua orang bahkan golongan besar seperti negara.³⁷ Secara bahasa (*etimologi*), kata konflik sendiri berasal dari bahasa Yunani *konfigere* yang berarti memukul dan dari bahasa Inggris *conflict* yang berarti pertentangan. Sedangkan secara terminologi, konflik memiliki banyak definisi atau pengertian. Dengan kata lain, konflik memiliki dimensi pengertian yang sangat luas. Setidaknya hal itu terlihat dari beragam pengertian konflik yang dikemukakan oleh para ahli dari berbagai latar belakang keilmuan.

Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Konflik melekat erat dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Perang atau pertikaian yang telah terjadi pada abad-abad yang lampau merupakan contoh nyata dari konflik dimaksud.³⁸

Menurut penjelasan A.M Harjana, konflik adalah perselisihan, pertentangan, percekocokan merupakan pengalaman hidup paling mendasar. Karena meskipun tidak harus, tetapi mungkin antara dua orang atau dua kelompok, di mana perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya menjadi saling terganggu.

Konflik sebagai suatu proses dari peristiwa-peristiwa atau fenomena yang mengarah pada interaksi yang disertai kekerasan antara dua pihak atau lebih. Dengan kata lain, pada dasarnya sistem sosial terdiri dari unit-unit yang saling berhubungan satu sama lainnya dan di dalamnya terdapat ketidakseimbangan atas pembagian kekuasaan dan kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuasaan mulai mempertanyakan legitimasi

³⁷ Decki Natalis Pigay, *Evolusi Nasionallisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*, Jakarta: Dinamika Daya Andalan, 2000, h. 66.

³⁸ William Hendricks, *Bagaimana Mengelola Konflik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 1.

dan pertanyaan tersebut pada gilirannya mengubah kesadaran untuk mengubah sistem alokasi kekuasaan.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Dalam bentuk ekstremnya, konflik dilangsungkan tidak hanya sekadar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi. Konflik juga bertujuan sampai tahap pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

Dalam kajian tentang konflik setidaknya ada empat tipe konflik yang dapat diidentifikasi, antara lain salah paham, konflik tata nilai, konflik kepentingan, dan konflik penaksiran (*assessment*). Konflik pada tipologi pertama (salah paham) diakibatkan oleh masalah komunikasi dan umumnya muncul dalam konteks kebahasaan, meskipun dapat juga karena perbedaan budaya etnis. Konflik tata nilai lebih berkaitan dengan kontradiksi etika atau keagamaan. Konflik kepentingan lebih banyak berkaitan dengan kelangkaan sumber daya ekonomi atau karena munculnya kelompok-kelompok sosial tertentu. Sedangkan konflik perkiraan terjadi manakala para pihak melakukan penaksiran terhadap nilai suatu ukuran secara berbeda meskipun mereka sama-sama setuju akan tujuan dari ukuran tersebut.

Setiap konflik memiliki dua sisi, yakni sisi positif dan sisi negatif. Pada sisi positif, konflik diperlukan untuk perubahan sekaligus dapat menghilangkan elemen-elemen pemisah dan menjadi komponen penyatu hubungan sosial. Sedangkan pada sisi negatif, konflik dipandang buruk karena ia bersifat destruktif dan mengindikasikan hancurnya kontrol sosial serta menyebabkan ketidakstabilan dalam tatanan masyarakat.

Jadi menurut perspektif ini, fenomena konflik memiliki dua peran sekaligus, yakni peran yang bersifat destruktif dan peran yang bersifat integratif. Dengan kata lain, konflik, yang umumnya dipandang sebagai sebuah penyakit karena dapat mengancam keutuhan dan kestabilan suatu masyarakat, pada kenyataannya dapat juga menjadi sebuah media konstruksi sosial, yang apabila terselesaikan dengan baik, justru akan memperkuat proses integrasi dalam masyarakat.³⁹

Sosiolog konflik Amerika Serikat, Lewis Coser menekankan pada konsekuensi-konsekuensi terjadinya konflik pada sebuah sistem sosial

³⁹ Henry Iwansyah, *Segregasi Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara*, Lampung: Percetakan Osa, 2013, h. 13.

secara keseluruhan. Teorinya menunjukkan kekeliruan jika memandang konflik sebagai hal yang melulu merusak sistem sosial karena konflik juga dapat memberikan keuntungan pada masyarakat luas di mana konflik tersebut terjadi. Konflik justru dapat membuka peluang integrasi antarkelompok.

Coser melihat konflik sebagai mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian, dapat memberikan peran positif, atau fungsi positif, dalam masyarakat. Pandangan teori Coser pada dasarnya merupakan usaha menjembatani teori fungsional dan teori konflik. Hal itu terlihat dari fokus perhatiannya terhadap fungsi integratif konflik dalam sistem sosial.

Coser sendiri sepakat pada fungsi konflik sosial dalam sistem sosial, lebih khususnya dalam hubungannya pada kelembagaan yang kaku, perkembangan teknis, dan produktivitas, dan kemudian konsen pada hubungan antara konflik dan perubahan sosial. Ia memberikan perhatian terhadap asal mula konflik sosial bahwa ada keagresifan atau bermusuhan dalam diri orang. Coser membedakan dua tipe dasar konflik, yaitu realistik dan non-realistik. Coser sendiri banyak dipengaruhi oleh George Simmel. Keduanya adalah orang realis yang melihat konflik dan integrasi sebagai dua sisi yang saling memperkuat atau memperlemah satu sama lain.

Konflik realistik memiliki sumber yang konkret atau bersifat material seperti sengketa sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh sumber sengketa itu, dan apabila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik akan segera dapat diatasi dengan baik. Konflik non-realistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis. Konflik ini seperti konflik antaragama, antaretnis, dan konflik antarkepercayaan. Antara konflik realistik dan non-realistik, konflik non-realistik yang cenderung sulit untuk menemukan solusi konflik atau sulitnya mencapai konsensus dan perdamaian. Menurut Coser sangat memungkinkan bahwa konflik melahirkan kedua tipe ini sekaligus dalam situasi konflik yang sama.

Menurut Hardjana (1994) konflik, perselisihan, percekocokan, dan pertentangan merupakan pengalaman hidup yang cukup mendasar dan amat mungkin terjadi. Seperti pengalaman hidup yang lain, konflik tidak bisa dirumuskan secara ketat. Lebih tepat jika konflik itu diuraikan dan dilukiskan.

Konflik terjadi manakala dalam hubungan antara dua orang/kelompok atau lebih, perbuatan atau tindakan yang satu berlawanan dengan

perbuatan atau tindakan yang lain sehingga salah satu atau beberapa orang/kelompok tersebut saling terganggu. Konflik merupakan hal yang dapat atau biasa terjadi dalam hidup. Secara teoritis konflik berpotensi timbul dalam setiap interaksi sosial, tidak hanya disebabkan karena adanya perjuangan untuk bertahan hidup dengan keterbatasan ruang/sumber daya, tetapi juga disebabkan adanya insting agresif dan kompetitif yang dimiliki oleh manusia (*innate instinct*).

Ada beragam konflik tergantung dari sudut pandang sehingga jika dipandang dari aspek perilaku terhadap sasaran, konflik dikategorikan ke dalam empat kategori, yaitu (1) prakonflik, yaitu ada perbedaan tetapi belum menjadi sumber konflik; (2) konflik tertutup (*laten*), yaitu konflik tersembunyi atau tidak muncul di permukaan tetapi terus berlangsung; (3) konflik permukaan (*emerging*), yaitu konflik yang tampak atau muncul hanya karena kesalahpahaman atas sasaran yang ingin dicapai; dan (4) konflik terbuka (*manifest*) yaitu konflik atau pertentangan yang sangat nyata (kentara) dan berakar sangat mendalam.

Menurut Wirawan, ada beberapa jenis konflik jika ditinjau dari beberapa aspek, antara lain sebagai berikut.

1. Aspek subjek yang terlibat dalam konflik. Konflik pada dasarnya tidak muncul dengan sendirinya. Subjek merupakan unsur yang pada umumnya terlibat dalam konflik. Ada beberapa jenis konflik yang didasarkan pada subjek, di antaranya sebagai berikut.
 - a. Konflik personal, yaitu konflik yang terjadi dalam diri seseorang karena harus memilih dari sejumlah alternatif pilihan,
 - b. Konflik interpersonal, yaitu konflik yang terjadi antar personal dalam suatu organisasi, di mana para pihak dalam organisasi saling bertentangan, dan
 - c. Konflik *of interest*, yaitu konflik yang berkembang dari konflik interpersonal di mana para individu dalam organisasi memiliki *interest* yang lebih besar daripada *interest* organisasi sehingga memengaruhi aktivitas organisasi.
2. Aspek substansi konflik. Konflik pada dasarnya juga terkait dengan hal yang bersifat substansial. Ada beberapa jenis konflik berdasarkan aspek substansi konflik, antara lain sebagai berikut.
 - a. Konflik realistik, yaitu konflik di mana isu ketidaksepahaman atau pertentangan terkait dengan substansi atau objek konflik sehingga

- dapat didekati dari dialog, persuasif, musyawarah, negosiasi ataupun *voting*,
- b. Konflik non-realistis, yaitu konflik yang tidak berhubungan dengan substansi atau objek konflik, tetapi hanya cenderung ingin mencari kesalahan lawan, baik dengan cara kekuasaan, kekuatan dan agresi maupun paksaan.
3. Aspek keluaran. Konflik pada dasarnya tidak untuk dibiarkan atau didiamkan, tetapi konflik meniscayakan sebuah penyelesaian. Oleh karena itu, ada beberapa jenis konflik jika dilihat dari aspek keluaran, antara lain sebagai berikut.
 - a. Konflik konstruktif, yaitu konflik dalam rangka mencari dan mendapatkan atau meraih solusi.
 - b. Konflik destruktif, yaitu konflik yang tidak menghasilkan atau tidak berorientasi pada solusi, mengacaukan, menang sendiri, dan hanya saling menyalahkan.
 4. Aspek bidang kehidupan. Konflik juga meniscayakan terjadi dalam banyak bidang kehidupan seperti bidang ekonomi. Konflik Sumber Daya Hayati (SDH) merupakan konflik yang terjadi lebih dipicu keterbatasan sumber daya alam. Manusia pada dasarnya berkembang dan terjadi perebutan atas akses dan sumber-sumber ekonomi, perebutan penguasaan atas sumber-sumber ekonomi, dan dapat saja memicu konflik-konflik bidang kehidupan lainnya.

Suprohardjo berpendapat bahwa konflik dibagi menjadi dua jenis berdasarkan level permasalahannya, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Sedangkan konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antarmasyarakat atau antarinstansi pemerintah.

Konflik secara umum dimaknai sebagai bentuk pertentangan antara satu pihak dan pihak lainnya dengan alasan-alasan tertentu yang melatarinya. Pluralitas masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai ke Merauke pun merupakan potensi konflik tersendiri yang setiap saat bisa "meledak", meskipun keragaman masyarakat Indonesia dibalut dengan apik melalui falsafah Bhinneka Tunggal Ika.

Konflik sendiri pada dasarnya tidak hanya menjadi potensi yang ada dalam masyarakat yang majemuk atau plural. Dalam masyarakat yang homogen sekalipun, potensi konflik juga akan selalu ada. Konflik pada

dasarnya bersifat laten yang suatu saat bisa terjadi kapan pun dan di mana pun.

Sebagai bangsa yang besar dengan keragaman yang dimilikinya, sejarah bangsa Indonesia telah merekam banyak konflik sosial yang telah terjadi. Konflik yang terjadi pun memiliki nuansa yang beragam mulai dari konflik bernuansa agama, politik, ekonomi, hingga yang bernuansa ras dan etnik.

Konflik sesungguhnya tidak muncul dengan sendirinya. Menurut Suporahardjo (2000), sumber konflik adalah adanya perbedaan dan perbedaan tersebut bersifat mutlak. Artinya secara objektif memang berbeda. Perbedaan dimaksud dapat terjadi pada tataran, antara lain (1) perbedaan persepsi; (2) perbedaan pengetahuan; (3) perbedaan tata nilai; (4) perbedaan kepentingan; dan (5) perbedaan pengakuan hak kepemilikan (klaim).

Wirawan (dalam Anshori, 2013) menyebutkan bahwa konflik dapat terjadi karena sejumlah penyebab seperti keterbatasan sumber, tujuan yang berbeda, komunikasi yang tidak baik, keragaman sosial, dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Konflik sendiri sesungguhnya tidak untuk dibiarkan, namun justru untuk diselesaikan. Upaya penyelesaian konflik pun dikenal dengan istilah resolusi konflik. Menurut Wirawan (dalam Anshori, 2013), resolusi konflik adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan metode resolusi konflik, sedangkan metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik yang mencakup metode pengaturan diri (*self-regulation*) maupun metode intervensi pihak ketiga.

Konflik dibedakan atas dua bagian, yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan konflik yang tidak berwujud kekerasan. Konflik kekerasan pada umumnya terjadi dalam masyarakat dan negara yang belum memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan negara dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga sehingga dampaknya adalah huru-hara (*riot*), sabotase, kudeta, pemberontakan, separatisme, dan revolusi.

Hal ini berbeda dengan konflik yang tidak mengandung kekerasan yang bisa ditemui pada masyarakat dan negara yang memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan sehingga penyelesaian bisa melalui lembaga yang legal formal misalnya demonstrasi, pemogokan, pengajuan petisi, dialog dan polemik melalui surat kabar, dan lain-lain.

Resolusi konflik sebagai kajian keilmuan, merupakan hal yang bisa dikatakan baru. Pada awalnya di setiap konflik terjadi dalam suatu masyarakat selalu cenderung berujung pada kekerasan antar pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, resolusi konflik merupakan kajian keilmuan yang dianggap baru.

Menurut Morton Deutsch, resolusi konflik merupakan sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik. Resolusi konflik atau dalam bahasa Inggris disebut *conflict resolution* memiliki pengertian yang berbeda-beda. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, melakukan pemecahan, dan penghapusan atau penghilangan permasalahan.⁴⁰

Sedangkan Weitzman dalam Morton and Coleman, mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*).⁴¹ Resolusi konflik juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru.

Resolusi konflik adalah suatu cara individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain atau kelompok lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh diri mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral, dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik guna menyelesaikan masalahnya.

Resolusi konflik merupakan sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik. Dengan kata lain, resolusi konflik dapat diartikan sebagai penyelesaian konflik atau upaya penanganan suatu konflik.

⁴⁰ Stewart Levine, *Getting to Resolution (Turning Conflict into Collaboration)*. San Fransisco: Berrett Koehler Publishers Inc, 1998, Hal. 3.

⁴¹ Deutsch Morton and Peter T. Coleman, *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice*. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 2006, Hal. 197.

Resolusi konflik memiliki tujuan agar kita dapat mengetahui bahwa konflik itu ada dan diarahkan pada keterlibatan pelbagai pihak dalam isu-isu mendasar sehingga dapat diselesaikan secara efektif. Selain itu, agar kita memahami gaya dari resolusi konflik dan mendefinisikan kembali jalan pintas ke arah pembaruan penyelesaian konflik.

Resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik antara dua pihak agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu-isu yang lebih nyata. Selain itu, resolusi konflik dipahami pula sebagai upaya dalam menyelesaikan dan mengakhiri konflik.

Dalam kehidupan, konflik adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Ketika seseorang menyatakan masalah mereka dan mencari solusinya, konflik menjadi sumber daya yang berharga dibandingkan sebuah masalah yang harus diselesaikan. Dengan demikian, resolusi konflik adalah suatu metode dan proses terkonsep yang digunakan untuk membantu menyelesaikan konflik dengan damai.

Dalam resolusi konflik, terdapat beberapa teori di dalamnya, yaitu dialog. Dialog diartikan sebagai pembicaraan dua pihak atau lebih untuk saling bertukar nilai-nilai masing-masing pihak yang bertujuan untuk saling memberi informasi. Untuk dapat melakukan dialog, kedua pihak yang terlibat harus memerhatikan beberapa pedoman dalam dialog, antara lain utuh dan autentik, saling terbuka, adanya pijakan yang sama atau titik temu (*common enemy: social pathology*), tujuan untuk saling memahami, dan materi dialog.

Kedua, negosiasi. Negosiasi adalah proses perundingan dua pihak yang bertikai baik sifatnya individual maupun kelompok untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling menguntungkan. Menurut Syahrizal Abbas, negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah dan perundingan. Dengan kata lain, negosiasi adalah suatu proses struktur di mana para pihak yang bersengketa berbicara sesama mereka mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama. Syarat-syarat untuk melakukan negosiasi di antaranya sebagai berikut.

1. Bersedia membagi kepentingan bersama
2. Sepakat dalam prosedur negosiasi yang ditempuh
3. Bersifat sukarela, dan
4. Saling dipercaya

5. Mencari berbagai alternatif dalam mencari solusi (jika *deadlock* maka dapat dilanjutkan pada kesempatan lain).

Tujuan dilakukannya negosiasi adalah untuk mendapatkan penyelesaian masalah bersama dengan mengompromikan perbedaan yang ada sehingga mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*) bukan saling merugikan (*lose-lose solution*) maupun menang kalah (*win-lose*). Oleh karena itu, dalam proses negosiasi kedua pihak yang berkonflik diharapkan dapat melakukan kompromi dengan baik dalam rangka mencapai tujuan yang saling menguntungkan.

Selanjutnya adalah mediasi. Mediasi merupakan sebuah proses di mana pihak-pihak yang bertikai dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian. Metode pemecahan konflik dengan cara menengahi para kelompok yang saling terlibat konflik melalui bantuan pihak ketiga. Pelaku mediasi yang bertugas sebagai penengah disebut dengan mediator yang bertugas menjelaskan proses dan membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik dengan tahapan-tahapan mediasi yang telah disiapkan.

Untuk melakukan mediasi ada tiga tahap yang harus diperhatikan, yakni *preparation*, beberapa hal yang dilakukan pada tahap ini adalah; pengenalan, representasi atau pengecekan para pihak yang memiliki kapasitas untuk melakukan mediasi, dan kesepakatan para pihak untuk memulai proses mediasi./ Kedua, *mediation session*, proses yang termasuk dalam tahapan ini, antara lain *opening, stories, agenda, option, agreement, dan closing. Follow up*, merupakan pelaksanaan hasil-hasil kesepakatan oleh kedua pihak yang berkonflik dan dituangkan secara bersama-sama dalam perjanjian tertulis.

Terakhir adalah *peace building*, yaitu strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antarpihak yang terlibat dalam konflik.

Menurut Johan Galtung, perdamaian diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu perdamaian positif (*positive peace*) dan perdamaian negatif (*negative peace*). Perdamaian positif adalah sebuah situasi tiadanya segenap masalah struktural yang dapat menebar benih ketidakpuasan dan dapat menyulut konflik. Perdamaian negatif adalah mengartikan damai semata-mata sebagai ketiadaan konflik kekerasan (*the absence of violent conflict*). Sedangkan konsep perumusan tujuan akhir dari *peace building* adalah terciptanya perdamaian positif.

Tabel 3.1 Berbagai Alat atau Instrumen dalam Analisis Konflik

No	Instrumen	Tujuan
1	Analisis akar permasalahan	Untuk membantu para pemangku kepentingan menguji asal usul dan sebab-sebab dasar konflik
2	Analisis Isu	Untuk menguji isu-isu yang berkontribusi terhadap konflik dan isu-isu spesifik yang meningkat menjadi konflik yang spesifik, yang secara lebih detail difokuskan pada lima kategori, yaitu <ol style="list-style-type: none"> Masalah yang berhubungan dengan informasi Konflik kepentingan Hubungan yang sulit Ketidaksamaan struktural Nilai-nilai yang bertentangan
3	Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan	Untuk melakukan identifikasi dan menilai ketergantungan dan kekuasaan dari para pemangku kepentingan yang berbeda-beda dalam suatu konflik.
4	Analisis 4 R (right, responsibilities, return, relationships-hak, tanggung jawab, hasil, hubungan)	<ol style="list-style-type: none"> Untuk menguji hak, tanggung jawab dan keuntungan para pemangku kepentingan yang berbeda dalam hubungannya dengan sumber daya alam, sebagai bagian usaha memperbaiki pemahaman akan suatu konflik Untuk menguji hubungan antar atau dalam kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang berbeda.
5	Konflik waktu	<ol style="list-style-type: none"> Untuk membantu para pemangku kepentingan dalam menguji sejarah sebuah konflik Untuk meningkatkan pemahaman terhadap urutan kejadian yang menghasilkan konflik tersebut.

Manajemen konflik sendiri pada dasarnya dapat diartikan atau didefinisikan sebagai praktek mengidentifikasi konflik, menangani konflik secara bijaksana, adil, efisien, dan mencegah konflik agar tidak

lepas kendali. Sejalan dengan pentingnya penyelesaian konflik sosial, pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan payung hukumnya, yaitu UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Menurut Louis Kriesberg (1998), kajian tentang konflik dapat dibedakan menjadi 4 (empat) hal, yaitu isu yang dikonflikkan, karakteristik dari kelompok-kelompok yang berkonflik, hubungan antara kelompok-kelompok yang berkonflik, dan cara yang digunakan oleh masing-masing kelompok yang berkonflik. Dalam proses resolusi konflik tentu melalui sejumlah tahapan. Ada beberapa tahapan dari proses resolusi konflik yang meliputi tahap de-eskalasi konflik, tahap negosiasi, tahap *problem-solving approach*, dan tahap *peace building*.

Jika mencermati kajian tentang konflik secara umum maka ditemukan tiga komponen utama dalam konflik, yaitu

1. Kepentingan (*interest*), baik yang bersifat subjektif maupun objektif,
2. Emosi (*emotional*), yaitu perasaan seperti kemarahan, ketakutan dan lain-lain, serta
3. Nilai (*values*), yang seringkali sulit terukur dan tertanam pada ide dan perasaan mengenai benar dan salah dalam mengatur perilaku kita.⁴²

Konflik pada dasarnya dapat dianalisis dengan bantuan sejumlah alat atau instrumen yang sederhana, praktis dan dapat diadaptasikan. Tabel 3.1 menjelaskan mengenai alat atau instrumen tersebut dan bagaimana menggunakannya di lapangan. Penerapan instrumen tersebut tentunya bukan merupakan hal yang kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan situasi yang spesifik, dan kebutuhan para mediator.

⁴² M. Afif Anshori, *Pemetaan Resolusi Konflik di Lampung*, Lampung: LP2M IAIN Raden Intan, 2013, hal. 97.

Kabupaten Barito Utara: Bumi Iya Mulik Bengkang Turan

Pada bab ini akan dipaparkan secara singkat gambaran tentang Kabupaten Barito Utara. Sajian tentang kabupaten ini dipandang penting agar pembaca buku ini memperoleh gambaran dengan cukup memadai di mana daerah ini merupakan salah satu daerah di Kalimantan Tengah yang masih merawat tradisi Manyanggar sebagai bentuk kearifan lokal.

Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini berdiri pada tanggal 29 Juni 1950. Kabupaten ini memiliki semboyan “*Iya Mulik Bengkang Turan* (Pantang Menyerah Sebelum Berhasil).” Sejak 5 Juni 2012 Kabupaten Barito Utara resmi secara administratif terbagi menjadi 9 kecamatan, yakni 6 kecamatan induk dan 3 kecamatan hasil pemekaran, 10 kelurahan, dan 93 desa. Pemekaran 3 kecamatan baru didasarkan pada Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Teweh Selatan, dan Kecamatan Lahei Barat. Kecamatan Teweh Baru dan Kecamatan Teweh Selatan merupakan pemekaran dari Kecamatan Teweh Tengah, sedangkan Kecamatan Lahei Barat merupakan pemekaran dari Kecamatan Lahei.

Pemekaran beberapa kecamatan ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat pun dapat ditingkatkan, pembangunan sarana dan prasarana umum juga dapat meningkat sehingga memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara astronomis, Kabupaten Barito Utara terletak pada posisi 114 27'3,32" – 115 50'47" Bujur Timur dan 0 49'00" Lintang Utara- 1 27'00" Lintang Selatan. Sedangkan secara geografis, Kabupaten Barito Utara, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya (Provinsi Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur), dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas (Kalimantan Tengah).

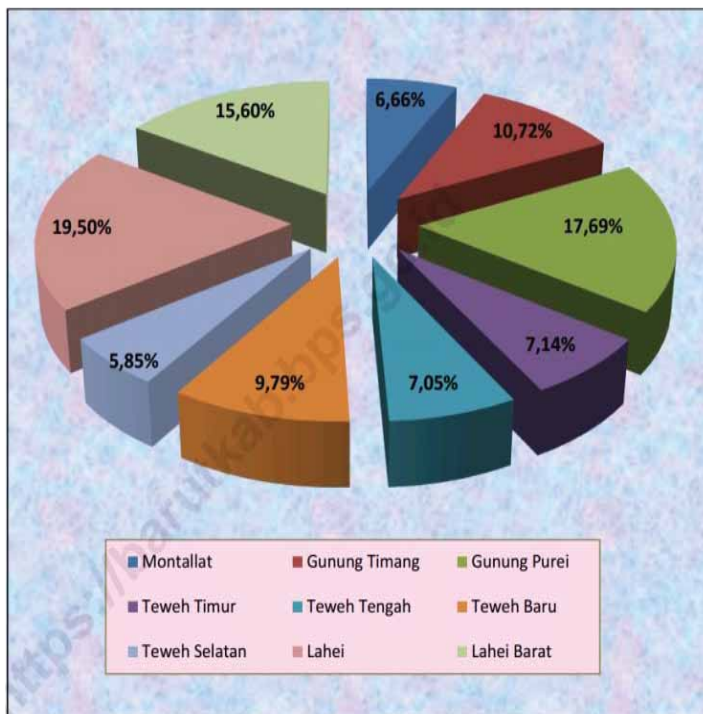
Secara topografis, Kabupaten Barito Utara dari sebelah selatan ke timur merupakan dataran agak rendah, sedangkan ke arah utara dengan bentuk daerah berbukit-bukit lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Schwaner. Bagian wilayah dengan kelerengn 0–2 persen terletak di bagian selatan tepi Sungai Barito, yaitu Kecamatan Montallat dan Kecamatan Teweh Tengah seluas 165 km² (2 persen). Bagian wilayah dengan kemiringan 2–15 persen tersebar di semua kecamatan seluas 1.785 km² (21,5 persen).

Dari sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Utara, Grafik 4.1 menunjukkan atau menggambarkan secara jelas bahwa ada beberapa kecamatan yang memiliki wilayah cukup luas seperti Kecamatan Lahei. Kecamatan ini merupakan kecamatan dengan wilayah yang paling luas

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	Montallat	553.00	6.66
2	Gunung Timang	890.00	10.72
3	Gunung Purei	1.468.00	17.69
4	Teweh Timur	592.22	7.14
5	Teweh Tengah	585.36	7.05
6	Teweh Baru	812.78	9.79
7	Teweh Selatan	485.64	5.85
8	Lahei	1.618.48	19.50
9	Lahei Barat	1.294.52	15.60
Jumlah/ Total		8.300.00	100.00

(Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara 2018)



Gambar 4.2 Luas Wilayah Barito Utara per Kecamatan (dalam Persen)

dan Kecamatan Teweh Selatan merupakan kecamatan yang paling kecil wilayahnya dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

Selain memiliki 9 (sembilan) kecamatan, Kabupaten Barito Utara juga memiliki sejumlah desa dengan beberapa kategori desa yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan. Berdasarkan data administrasi Kabupaten Barito Utara, kabupaten ini total memiliki 103 desa dan kelurahan. Kecamatan Gunung Timang merupakan kecamatan dengan desa yang paling banyak (16 desa) ketimbang delapan kecamatan lainnya.

103 desa dan kelurahan yang tersebar di sembilan kecamatan terdiri dari tiga kategori, yakni desa swadaya (tradisional), desa swakarya (transisional), dan desa swasembada (berkembang) sebagaimana mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pengkategorian desa-desa tersebut merupakan cara pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk memetakannya dari sisi tingkat kesejahteraan.

Tabel 4.2 Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Banyaknya/ <i>Number</i>			Jumlah <i>Total</i>
	Desa <i>Village</i>	Kelurahan <i>Urban</i>	Persiapan <i>Prepare</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Montallat	6	-	-	10
Gunung Timang	16	-	-	16
Gunung Purei	11	-	-	11
Teweh Timur	12	-	-	12
Teweh Tengah	8	2	-	10
Teweh Baru	8	2	-	10
Teweh Selatan	10	-	-	10
Lahei	11	2	-	13
Lahei Barat	11	-	-	11
Jumlah / Total	93	10	-	103

Sumber: Master File Desa (MFD) Online BPS Kabupaten Barito Utara Kondisi Desember 2017
 Source: MFD Online of BPS-Statistics of Barito Utara Regency, Data Reported until December 2017

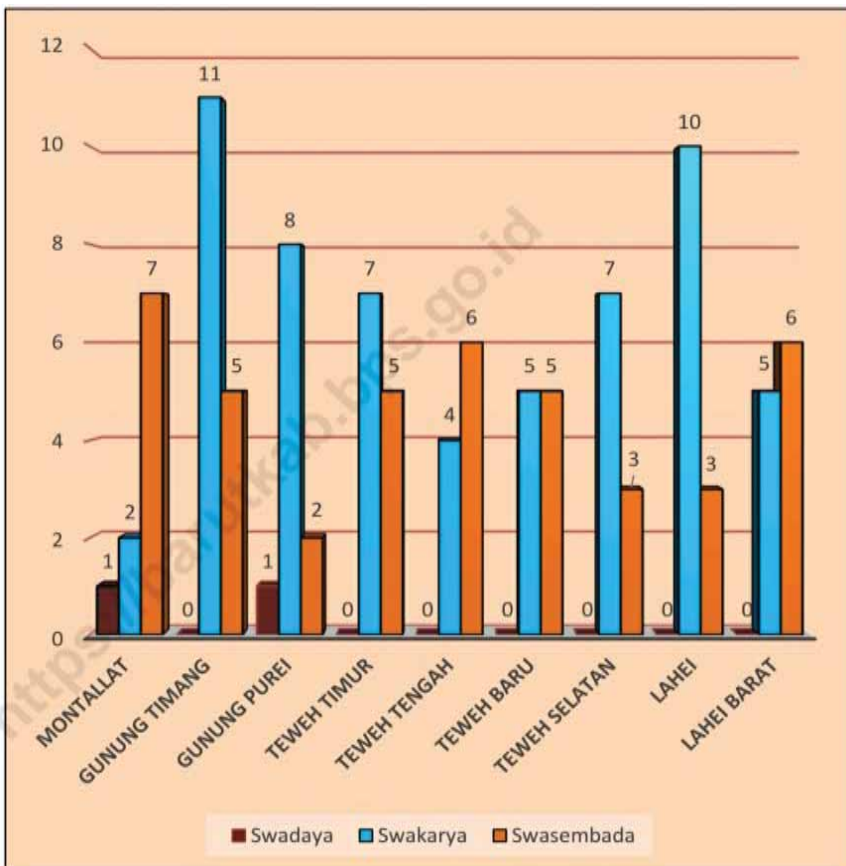
Tabel 4.3 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Desa/Kelurahan

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Banyaknya/ <i>Number</i>			Jumlah <i>Total</i>
	Swadaya <i>Innate Energy</i>	Swakarya <i>Self Developing</i>	Swasembada <i>Self Supporting</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Montallat	1	2	7	10
Gunung Timang	-	11	5	16
Gunung Purei	1	8	2	11
Teweh Timur	-	7	5	12
Teweh Tengah	-	4	6	10
Teweh Baru	-	5	5	10
Teweh Selatan	-	7	9	10
Lahei	-	10	9	13
Lahei Barat	-	5	6	11
Jumlah / Total	2	59	42	103

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara
 Source: Regional office of Social Affair, Village and People Empowerment of Barito Utara Regency

Program pembangunan desa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat merupakan wujud nyata atensi atau perhatian serta komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan desa melalui program-program penguatan dan pemberdayaan desa. Komitmen pemerintah tersebut dikuatkan melalui UU Pemerintahan Desa dan peningkatan anggaran desa yang mencapai 1 M (satu miliar) setiap desa di semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rincian banyaknya desa/kelurahan berdasarkan klasifikasinya dapat dilihat pada Tabel 4.3.

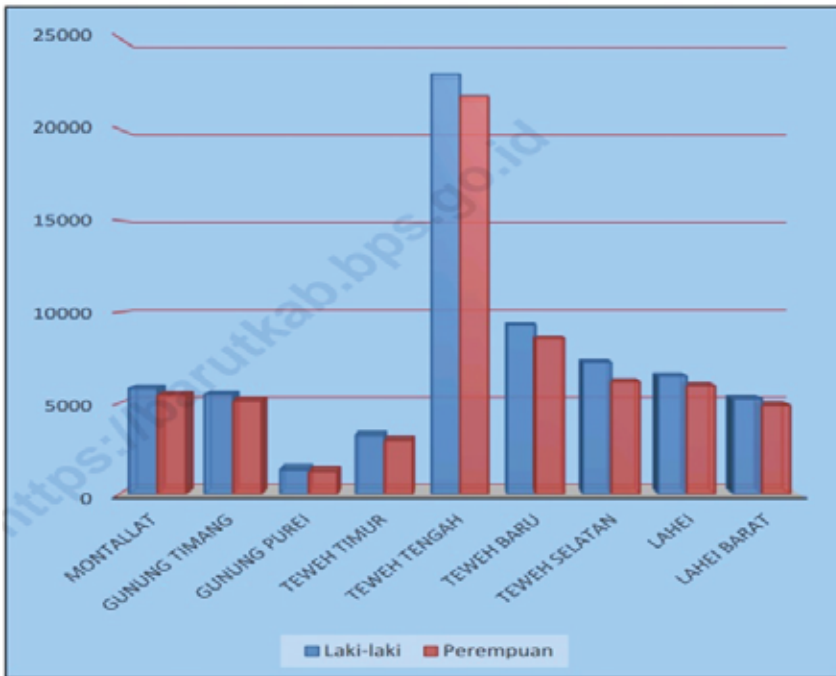
Berdasarkan Tabel 4.3, terlihat jelas bahwa secara umum dari sembilan kecamatan di Kabupaten Barito Utara, jumlah desa dengan kriteria desa



Gambar 4.3 Jumlah Desa Menurut Kategori (BPS-Kabupaten Barito Utara, 2018)

swakarya menduduki posisi terbanyak (59 desa). Sementara itu, hanya ada dua desa dengan kategori swadaya, masing-masing satu desa di Kecamatan Montallat dan satu desa di Kecamatan Gunung Purei. Desa dengan kategori swasembada berjumlah 42 desa.

Penduduk Kabupaten Barito Utara berjumlah 129.287 jiwa. Jumlah penduduk perempuan secara kuantitas lebih kecil jumlahnya daripada jumlah penduduk laki-laki, yaitu 48.04 persen perempuan dan 51.96 persen laki-laki. Berdasarkan luas wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, kepadatan penduduk di Kabupaten Barito Utara tergolong jarang, di mana hanya ada sekitar 16 orang per/km². Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Utara, Kecamatan Teweh Tengah merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang paling banyak, sedangkan kecamatan Gunung Purei merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit baik laki-laki maupun perempuan. Komposisi penduduk



Gambar 4.4 Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Utara (BPS Kabupaten Barito Utara 2018)

berdasarkan jenis kelamin dari setiap kecamatan tergambar dalam Gambar 4.4.

Sementara itu, penduduk Kabupaten Barito Utara jika dilihat berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin ternyata lebih besar kelompok usia 5–9 tahun. Penduduk dengan rentang usia 5–9 tahun tersebut secara kuantitas lebih besar jumlah anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Sedangkan penduduk berusia 75 tahun ke atas secara kuantitas justru lebih banyak penduduk berjenis kelamin perempuan daripada penduduk berjenis kelamin laki-laki. Rincian atau detail jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
	(1)	(2)	
0–4	6.173	6.033	12.206
5–9	6.467	6.069	12.536
10–14	6.223	5.988	12.211
15–19	5.517	5.328	10.845
20–24	4.999	4.858	9.857
25–29	5.586	5.290	10.876
30–34	5.898	5.432	11.330
35–39	5.909	5.741	11.650
40–44	5.836	5.095	10.931
45–49	4.725	4.078	8.803
50–54	3.623	2.724	6.347
55–59	2.402	2.014	4.416
60–64	1.783	1.430	3.213
65–69	1.010	962	1.972
70–74	561	538	1.099
75+	467	528	995
Jumlah / Total	67.179	62.108	129.287

Sumber: Proyeksi penduduk Kabupaten Barito Utara Tahun 2010-2020 (Bappenas, BPS, UNFPA)
 Source: *Population Projection of Barito Utara Regency 2010-2020* (Bappenas, BPS, UNFPA)
 (BPS Kabupaten Barito Utara, 2018)

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, dan Rumah Tangga per Kecamatan

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>			Rasio Jenis Kelamin <i>Sex Ratio</i>	Rumah Tangga <i>Households</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Montallat	5.822	5.458	5.458	107	2.808
Gunung Timang	5.485	5.109	5.109	107	2.699
Gunung Purei	1.333	1.229	1.229	108	756
Teweh Timur	3.206	2.915	2.915	110	1.528
Teweh Tengah	23.035	21.814	21.814	106	11.162
Teweh Baru	9.304	8.578	8.578	108	4.349
Teweh Selatan	7.265	6.180	6.180	118	3.572
Lahei	6.496	5.960	5.960	109	3.196
Lahei Barat	5.233	4.865	4.865	108	2.311
Jumlah / Total	67.179	62.108	129.287	108	32.381

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Barito Utara Tahun 2010-2020 (Bappenas, BPS, UNFPA)
 Source: *Population Projection of Barito Utara Regency 2010-2020* (Bappenas, BPS, UNFPA)
 (BPS Kabupaten Barito Utara, 2018)

Dari total jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Barito Utara, berdasarkan data BPS Kabupaten Barito Utara tahun 2018 terdapat 32.381 rumah tangga yang tersebar di sembilan kecamatan. Jumlah rumah tangga yang terbanyak berada di Kecamatan Teweh Tengah, sedangkan jumlah rumah tangga yang paling sedikit berada di Kecamatan Gunung Purei. Rincian jumlah rumah tangga di sembilan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Penduduk Kabupaten Barito Utara merupakan penduduk dengan keberagaman latar belakang baik dari sisi agama, etnik, ras, dan lainnya. Komposisi penduduk menurut agama yang dianut terdiri dari Islam (70%), Hindu/Kaharingan (12%), Kristen (11%), Katolik (6%), Budha, dan lainnya (1%). Data statistik berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Utara menunjukkan bahwa penduduk kabupaten ini mayoritas adalah beragama Islam yang tersebar di sembilan kecamatan. Jumlah pemeluk agama di Kabupaten Barito Utara setiap kecamatan tergambar dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Jumlah Pemeluk Agama per Kecamatan

No.	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Aliran Kepercayaan
1	Montallat	8551	743	427	1250	-	-	-
2	Gn. Timang	6693	3074	1139	1681	-	1	-
3	Gn. Purei	884	826	52	921	-	-	-
4	Teweh Timur	4182	769	400	1161	2	1	2
5	Teweh Tengah	47518	4980	1810	2013	49	2	12
6	Teweh Baru	15479	1814	1819	2316	-	-	11
7	Teweh Selatan	10005	1815	3354	399	3	-	1
8	Lahei	10643	1185	172	4431	-	-	10
9	Lahei Barat	5650	1158	73	2816	-	1	10
Jumlah		109.605	16.364	9.246	16.988	54	5	46

(BPS Kabupaten Barito Utara, 2018)

Kehidupan umat beragama dan juga penganut aliran kepercayaan di wilayah ini juga ditunjang dengan keberadaan tempat-tempat ibadah yang tersebar di sembilan kecamatan, meskipun jumlah tempat ibadah antarwilayah tidak merata. Hal itu tentu disebabkan jumlah umat beragama yang ada di setiap wilayah tidak sama. Pendirian dan keberadaan tempat-tempat ibadah pada dasarnya memang telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah melalui payung hukum yang ada, yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tertanggal 21 Maret 2006 selanjutnya disingkat dengan PBM 2006.

Pendirian rumah atau tempat ibadah di wilayah Kabupaten Barito Utara berdasarkan keterangan atau data dari Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara belum pernah terjadi konflik. Hal itu karena pihak kementerian agama setempat secara berkala memberikan sosialisasi kepada para pemeluk agama dan selama ini ketika akan mendirikan rumah atau tempat ibadah para pemeluk agama melalui para tokohnya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak kementerian agama setempat. Rincian jumlah tempat atau rumah ibadah setiap agama di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Pembangunan sebuah daerah tentu saja membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia. Terkait sumber daya manusia ini sebagai motor atau penggerak pembangunan tentu saja aspek pendidikan menjadi penting untuk diperhatikan. Berdasarkan kategori penduduk berusia 15

Tabel 4.7 Jumlah Tempat Peribadatan per Kecamatan

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Masjid <i>Mosque</i>	Mushola <i>Mushola</i>	Gereja Protestan <i>Christian Church</i>	Gereja Katholik <i>Catholic Church</i>	Pura <i>Temple</i>	Vihara <i>Vihara</i>
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)
Montallat	12	12	7	5	12	-
Gunung Timang	10	30	18	8	10	-
Gunung Purei	4	4	5	7	9	-
Teweh Timur	9	18	5	5	9	-
Teweh Tengah	38	65	24	1	16	1
Teweh Baru	16	12	10	4	8	-
Teweh Selatan	9	16	11	1	7	-
Lahei	10	6	11	1	14	-
Lahei Barat	7	2	12	2	12	-
Jumlah / Total	115	165	103	34	97	1

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara
 Source: Religion Ministry of Barito Utara Regency
 (BPS Kabupaten Barito Utara, 2018)

tahun ke atas yang menamatkan atau menyelesaikan tingkat pendidikan yang tertinggi adalah sekolah dasar dengan jumlah yang paling besar. Dari jumlah terbesar tersebut ternyata laki-laki lebih besar jumlahnya dibanding dengan perempuan. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi tidak cukup besar jumlahnya. Berdasarkan data tersebut, tampaknya pemerintah daerah penting mendorong dan menyusun program-program pendidikan yang dapat diakses lebih banyak oleh penduduknya. Rincian jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Kabupaten Barito Utara jika dilihat dari potensi daerah dan struktur ekonomi, maka sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan, meskipun peranannya menurun setiap tahunnya. Dominannya sektor ini karena didukung oleh sumber daya alam yang tersedia, yakni luasnya lahan untuk pertanian termasuk dalam sektor ini adalah perkebunan karet rakyat yang hampir di setiap desa di wilayah Kabupaten Barito Utara mengusahakannya secara turun temurun. Pada tahun 2013 Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertanian dan perkebunan mulai tergeser oleh sektor pertambangan. Sektor pertambangan

berperan signifikan bagi PDRB sebesar 23,57 persen. Pembangunan di Kabupaten Barito Utara terus dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip pembangunan berkesinambungan (*sustainability development*).

Tabel 4.8 Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan <i>Educational Attainment</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak/Belum Tamat SD <i>Not Completed/Not Yet Completed Primary School</i>	3.960	3.739	7.699
2. SD <i>Primary School</i>	9.521	6.799	16.320
3. SMP <i>General Junior High School</i>	8.211	3.162	11.373
4. SMA <i>Senior High School</i>	10.758	4.846	15.604
5. SMK <i>Technical Senior High School</i>	3.209	1.477	4.686
6. Diploma/Universitas <i>Diploma/University</i>	3.997	4.025	8.022
Jumlah/ Total	39.656	24.048	63.704

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2017
Source: National Labor Force Survey (2017)
(BPS-Kabupaten Barito Utara, 2018)

Manyanggar: Kearifan Lokal dan Komunikasi Sosial

TRADISI MANYANGGAR: BERTAHAN DI TENGAH ARUS MODERNISASI

Jamak dipahami bahwa setiap komunitas masyarakat memiliki kearifan lokalnya sendiri. Salah satunya ialah berupa tradisi atau budaya. Tradisi atau budaya lokal dimaksud harus menghadapi gelombang perubahan sosial melalui modernisasi kehidupan hampir di semua lini atau aspek. Konsekuensinya, ketika tradisi atau budaya lokal tersebut tidak mampu bertahan dari gelombang modernisasi maka tradisi atau budaya lokal dimaksud akan tergerus dan pada akhirnya punah. Terlebih jika generasi penerus tidak memiliki kepekaan, kesadaran, dan kepedulian dengan tradisi atau budayanya sendiri.

Manyanggar sebagai sebuah tradisi atau budaya masyarakat di Daerah Aliran Sungai Barito (DAS), Muara Teweh pun jika tidak memiliki “*self-survival capacity*” maka pelan namun pasti tradisi tersebut akan terkubur dan sirna ditelan gerak waktu.

Bagi masyarakat suku Dayak di Muara Teweh, Kalimantan Tengah, tradisi tersebut merupakan upacara adat yang dilakukan oleh mereka dengan pelbagai alasan. Mereka memercayai bahwa dalam kehidupan di dunia ini, selain manusia juga hidup makhluk “halus.” Perlunya

membuat rambu-rambu atau tapal batas dengan makhluk “halus” tersebut diharapkan agar keduanya tidak saling mengganggu alam kehidupan masing-masing serta sebagai ungkapan penghormatan terhadap batasan kehidupan makhluk lain.

Kata manyanggar berasal dari kata *sangga* yang berarti batasan atau rambu-rambu. Dari arti kata tersebut, upacara manyanggar kemudian diartikan sebagai ritual yang dilakukan untuk membuat batas-batas dari berbagai aspek kehidupan antara manusia dan makhluk gaib.

Tradisi manyanggar biasanya dilaksanakan pada saat panen kebun ataupun mengambil hasil alam dari hutan, salah satunya saat akan menebang pohon. Menebang pohon di hutan merupakan kebiasaan adat Dayak sejak dulu sampai sekarang. Selain itu, tradisi manyanggar juga digunakan untuk ritual dalam memulai pembuatan suatu bangunan atau membuka pemukiman baru, serta dapat menjadi sarana penyelesaian konflik di masyarakat.

Setiap suku Dayak satu dengan suku Dayak yang lain berbeda-beda dalam prosesi upacaranya, tetapi secara umum memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai wujud rasa syukur dan sebagai tolak bala. Pada umumnya, prosesi tradisi manyanggar dilakukan dengan meletakkan 7 gelas berisi tetesan darah hewan yang telah dikorbankan, di antaranya darah kerbau, kambing, ayam hitam, dan ayam putih. Ketujuh wadah tersebut disusun di lantai rumah-rumahan panggung berbahan kayu yang dindingnya dibalut kain kuning. Rumah-rumahan tersebut oleh masyarakat Dayak biasa disebut dengan *pasah* keramat.

Di *pasah* keramat tersebut juga ditempatkan aneka jenis makanan. Tiga mangkok berisi air putih dan jelantah diletakkan melingkar bersama empat mangkok berisi beras dan gulungan uang kertas serta rokok yang ditancapkan. Di bagian tengah terdapat sajian utama berupa sebuah nampan berisi empat puluh satu jenis kue makanan (*kakulih* putih, *kakulih habang* (merah), dodol ketan, wajik, madu kasirat, *tumpi angin* putih, *tumpi angin habang*, *tumpi angin kuning*, perut ayam putih, perut ayam *habang*, perut ayam kuning, *cincin* putih, *cincin habang*, *cincin kuning*, *gegatas* putih, *gegatas kuning*, *gaguduh* (pisang goreng), *gandang ramas* (pisang goreng), *gagauk*, ketupat burung, *ketupat keminting* (kemiri), ketupat biasa, *untuk panjang*, *untuk bulat*, buah *jingah* (ubi kayu rebus dibentuk seperti buah jingah), *papudak* putih, *papudak habang*, *papudak hijau*, *hintalu karuang* (telur burung karuang/*kikicak* putih, *kakicak habang*, bubur putih, *bubur habang*, tapai ketan, *lamang* (nasi ketan yang dimasak dalam bambu), *kaladi*

bजारang (talas rebus), cucur, pais pisang talas, *cangkaruk batu*, *cangkaruk barahai* (beras ketan tumbuk yang disangrai dengan gula merah), nasi ketan dengan inti).

Semua jenis kue tersebut dibuat dan disiapkan oleh perempuan yang sudah tidak haid lagi. Hal itu konon sebagai simbol bahwa dalam menyiapkan atau melakukan sesuatu, manusia harus bersih baik jasmani maupun rohaninya. Selain menyiapkan beraneka jenis kue makanan yang berjumlah empat puluh satu (41), bahan lain yang biasanya disiapkan adalah berupa air seperti air kelapa muda, air santan gula merah, kopi manis, dan kopi pahit. Lauk pauk seperti ikan *haruan* (gabus) panggang kaluk, *parafah* ayam dan *parafah* kambing. Sedangkan buah-buahnya terdiri dari pisang talas satu sisir, pisang mahuli satu sisir, dan kelapa 7 biji.

Beragam jenis makanan, minuman, lauk-pauk, dan buah-buahan tersebut merupakan bahan yang harus disiapkan dalam penyelenggaraan tradisi manyanggar. Terkait dengan empat puluh satu (41) jenis kue makanan yang berbeda tersebut, Zr, selaku pelaku atau tetua yang terlibat dalam prosesi manyanggar, ketika diwawancarai tidak bisa memberikan penjelasan secara gamblang dan detail kecuali jawaban klise bahwa sejak dulu (masa para leluhur) ia diajarkan seperti itu. Sayangnya, tidak ada penjelasan lisan atau tertulis yang cukup memadai terkait sejumlah menu hidangan yang harus disiapkan tersebut.

Tradisi leluhur masyarakat Dayak seperti manyanggar seiring dengan berjalannya waktu ternyata juga tidak selalu dilakukan setiap saat seperti dulu. Kondisi tersebut pada gilirannya menjadikan tradisi manyanggar tidak cukup dikenal oleh para generasi muda saat ini. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga dan merawat budaya lokal tersebut menjadi penting dilakukan. Hal itu ditegaskan oleh salah seorang tokoh budaya setempat, Zr. Ia mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Manyanggar te tradisi atawa budaya ji hampir nihau, dan cendrung ilih uluh are, karena jadi berubah si uluh are. Uluh are wayah tuh tukep dengan budaya matan teknologi. Jadi anak uluhan wayah tuh, kalau mainsek manyanggar, anak uluhan are jida ketawaie. Ji helu manyaggar tuh imbelum hindai, karena kejadian buruk ji manimpa daerah si barito utara. Gawian te indukung pemerintah daerah si hituh, kilau bupati dan dewan adat dayak.”

“Manyanggar itu tradisi atau budaya yang hampir terlupakan dan

cenderung ditinggalkan karena terjadi perubahan pandangan di masyarakat. Masyarakat sekarang lebih akrab dengan budaya yang dilahirkan dari kemajuan teknologi. Jadi generasi sekarang kalau ditanya apa itu manyanggar sebagian besar pasti banyak yang tidak tahu. Beberapa waktu lalu tradisi ini kembali mulai dihidupkan seiring pelbagai kejadian buruk yang menimpa di sejumlah wilayah di Barito Utara. Kebetulan kegiatan tersebut didukung oleh pemerintah daerah setempat, dalam hal ini bupati dan Dewan Adat Dayak (DAD).” (Wawancara, 23 Juni 2018)

Sosok Zr sendiri bukanlah sosok yang asing bagi masyarakat Dayak di Muara Teweh. Nama beliau sudah sangat familiar dalam hal seni dan budaya lokal. Menurut pengakuannya sendiri dan telah dikonfirmasi kepada sejumlah warga sekitar bahwa beliau adalah satu-satunya generasi tua yang bisa memimpin tradisi manyanggar.

Kemampuan yang dimilikinya, menurutnya bukan sesuatu yang bisa dipelajari sebagaimana bentuk-bentuk kepemimpinan yang lain, namun khusus untuk kepemimpinan dalam penyelenggaraan tradisi manyanggar ini merupakan semacam warisan leluhur yang tidak setiap orang dapat menerimanya. Sejumlah peralatan ritual untuk menyelenggarakan tradisi manyanggar sampai saat ini masih tersimpan rapi di rumahnya dan ia berkenan memperlihatkan beberapa peralatan ritual dimaksud ketika diwawancarai.

Kekhawatiran akan punahnya tradisi atau budaya manyanggar jika tidak dilestarikan juga diungkapkan oleh seorang warga berinisial R dan juga sebagai menantu Zr. Ia selalu membantu Zr dalam menyiapkan penyelenggaraan tradisi manyanggar. Ia mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

“Manyanggar tuh jarang diawi kecuali tege belaku matan uluh are. Uluh batuh beh ji tahu mengetawani. Uluh wayah tuh jida ketawaie atau mehining mayanggar. Manyanggar tuh jida rancak diawi. Manyanggar tuh hampir punah. Karena wilayah muara teweh tuh Zr beh ji bisa meawie. Amun sidin milihi, itah jida ketawan apakah anak-anak sidin bisa meawi atau jida. Sebab jida uluh are ji bisa meawi manyanggar tuh.”

“Budaya manyanggar ini jarang dilakukan kecuali ada permintaan dari warga atau masyarakat. Dan hanya orang-orang terdahulu

yang tahu. Anak-anak muda terutama anak-anak jaman sekarang mungkin tidak tahu atau mendengar manyanggar. Karena tradisi atau budaya manyanggar ini memang tidak dilakukan setiap saat. Bisa dikatakan tradisi atau budaya ini hampir punah. Karena di wilayah Muarateweh ini hanya Zr yang bisa melakukan. Kalau sepeninggal beliau suatu saat nanti kita tidak tahu apakah keturunannya bisa meneruskan atau tidak. Sebab tidak semua orang bisa melakukannya.” (Wawancara, 23 Juni 2018)

Budaya lokal sebagai warisan leluhur sudah sepatutnya dijaga dan dilestarikan agar jangan sampai punah. Pandangan itu juga dikemukakan oleh tokoh adat Dayak setempat, JS. Ia dengan jelas menyatakan sebagai berikut:

“Itah dari dewan adat dayak, malang penting pelestarian tradisi manyanggar tuh. Rencana e itah handak mengusulkan kan pamarintah daerah si hituh agar manyanggar tuh kilau kueh maawi due nyelu sinde. Manyagaar tuh digawi jaman batuh tahun 1997, dan hanyar 2017 meaawi uluh are lawan adat dayak manyanggar. Tege waktu ji tahi.”

“Kami dari Dewan Adat Dayak memandang penting perlunya pelestarian tradisi atau budaya lokal seperti manyanggar. Bahkan kami berencana dan mengusulkan ke pemerintah daerah agar tradisi tersebut bisa dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Terakhir kali tradisi atau budaya ini diselenggarakan sekitar tahun 1973 dan baru pada tahun 2017 masyarakat dan Dewan Adat Dayak berinisiatif untuk menyelenggarakan tradisi tersebut. Artinya ada rentang waktu yang begitu lama tradisi ini tak dilestarikan.” (Wawancara, 30 Juli 2018)

Pelestarian tradisi atau budaya lokal juga dipandang penting oleh pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara. Hal itu juga tertuang dalam misi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara (2013-2018) poin 5 yang berbunyi “memantapkan pelaksanaan pembangunan berdasarkan budaya kearifan lokal, toleransi, kultural, kerukunan antarumat beragama, suku, ras maupun golongan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”

Pihak pemerintah Kabupaten Barito Utara, dalam hal ini Dinas Budaya dan Pariwisata, menjadi *leading sector* dalam hal bagaimana tradisi atau

budaya lokal menjadi sesuatu yang penting untuk dijaga kelestariannya. Salah seorang birokrat di Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Utara, Is, memiliki pandangan tersendiri terkait hal itu. Ia mengemukakan sebagai berikut:

“Menurut iki, jida cukup ketawan kia soal manyanggar tuh. Sepengetauan iki te tradisi tuh tradisi jaman batuh, jaman uluh batuh. Tradisi tuh tahu jida diawi lawan ulu are. Sesuai beh dengan kebijakan si dinas Budaya dan Pariwisata, mahilup budaya lokal te panting. Pemerintah itah si kabupaten te menggau event setahun sinde kilau Budaya Iye Mulik. Tapi tradisi manyanggar tuh beken masuk acara si huang festival te.”

“Secara pribadi saya sebenarnya tidak cukup tahu soal tradisi atau budaya manyanggar. Sependek yang saya ketahui tradisi itu sudah lama sekali tidak diselenggarakan secara “besar-besaran”. Sesuai dengan kebijakan di Dinas Budaya dan Pariwisata, pelestarian budaya lokal memang menjadi perhatian tersendiri. Dan pemerintah kabupaten memiliki event tahun berupa Festival Budaya *Iye Mulik*. Hanya saja untuk tradisi atau budaya manyanggar sendiri sampai saat ini belum menjadi bagian dari festival tersebut.” (Wawancara, 31 Juli 2018)

Sedangkan Nd, Bupati Kabupaten Barito Utara, yang terpilih kembali pada Pilkada 2018, memberikan pandangannya tentang tradisi atau budaya lokal. Menurutnya, pada prinsipnya pemerintah daerah berkomitmen kuat untuk melestarikan kekayaan tradisi atau budaya lokal sebagaimana menjadi misi pemerintah kabupaten. Tradisi atau budaya lokal yang selama ini hampir tidak dihidupkan (lagi) oleh masyarakat, secara bertahap mulai digalakkan atau dihidupkan kembali. Hal itu menjadi penting agar generasi sekarang juga bisa mengenal tradisi atau budaya lokal setempat.

“Iki mealang penting dan meimbit uluh hituh uras samandeaehe supaya maku manjaga tradisi tuh. Si huang budaya tuh tege nilai-nilai luhur. Oleh sebab jite pemerintah si hituh setahun sinde meawi festival budaya, arannya festival iya Mulik. Festival tuh diawi setahun sinde dalam rangka andau lahir kabupateh barito utara, lawan agar uluh uras ketawan budaya lokal daerah itah.”

“Secara pribadi maupun atas nama pemerintah kabupaten, saya sendiri memandang penting dan mendorong masyarakat untuk

bisa menjaga dan melestarikan tradisi atau budaya lokal. Sebab di dalamnya sebenarnya mengandung nilai-nilai kehidupan yang luhur. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten setiap tahun memiliki agenda festival budaya bernama Festival Iya Mulik. Festival ini digelar setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Lahir Kabupaten Barito Utara sekaligus sebagai sarana mengenalkan kekayaan budaya lokal kita ke masyarakat.” (Wawancara, 31 Juli 2018)

Pelestarian tradisi atau budaya yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal pada dasarnya merupakan hal penting yang tidak boleh dilupakan atau bahkan ditinggalkan meskipun kehidupan masyarakat terus berkembang lebih modern dan maju. Tradisi atau budaya sesungguhnya lahir dari pemahaman masyarakatnya dalam konteks relasinya dengan alam. Hubungan harmoni antara manusia dan alam diwujudkan melalui sebuah ritual tradisi. Sebuah tradisi dilestarikan sesungguhnya juga akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang dirasakan sendiri oleh masyarakat. Hal itu pula yang dipercayai oleh SR. Ia mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

“Memang di jaman utuh, uras uluh maanggap jida lagi penting tradisi te. Pengaruh belum ji meimbit arah modern te ji mempengaruhi. Padahal menerut yaku tradisi te si huange tege nilai-nilai kearifan lokal ji harus uras lestarikan oleh uleh itah kia. Ije hal ji yaku percaya, tradisi te barangah tradisi apapun pasti si huange tege nilai-nilai kebajikan. Tinggal itah beh ji mahilung lawan memaknaie kilau narai”

“Memang di jaman sekarang, banyak orang kurang atau tidak (lagi) menganggap penting sebuah tradisi. Pengaruh kehidupan yang terus bergerak ke arah modern sedikit banyak menjadi faktor yang memengaruhi. Padahal, menurut saya sendiri, jika sebuah tradisi yang pada dasarnya memuat nilai-nilai kearifan lokal dilestarikan maka dampak atau hikmah kebajikannya akan juga dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Satu hal yang saya percayai adalah bahwa sesungguhnya sebuah tradisi apa pun jenis dan namanya pasti memuat nilai-nilai kebajikan. Tinggal cara kita saja yang memaknainya seperti apa.” (Wawancara, 29 Juli 2018)

Hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh SR juga diungkapkan oleh Er, seorang ibu rumah tangga, warga setempat yang kebetulan tinggal di dekat lokasi tempat penyelenggaraan tradisi manyanggar. Ia dengan jelas mengemukakan sebagai berikut:

“Tradisi atawa budaya lokal te samandeyahe penting untuk dihilung oleh uluh uras. Uluh kampung itah iki biasanya te mehapa atawa meawi tradisi bersih/memapas lewu. Intinya te gasan desa itah dibari keselamatan. Manyanggar tuh batuh diawi dengan biaya ji hai lawan kegiatannya didukung oleh pemerintah hituh. Sebagai warga te itah senang beh oleh gasan kebaikan uluh uras kia.”

“Tradisi atau budaya lokal sebenarnya ya masih penting untuk dilestarikan. Warga di kampung ini pun biasanya juga menyelenggarakan tradisi bersih-bersih desa meskipun dengan kecil-kecilan. Intinya kami berharap desa kami diberikan keselamatan. Kalau manyanggar beberapa waktu lalu diselenggarakan dengan biaya yang cukup besar dan kegiatannya pun didukung oleh pemerintah daerah. Sebagai warga kami sih senang karena hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama.” (Wawancara, 29 Juli 2018)

Kelestarian budaya lokal juga sangat dipengaruhi oleh masyarakatnya. Perubahan cara pandang atau cara berpikir masyarakat juga dianggap sebagai faktor yang memengaruhi kelestarian budaya lokal. Oleh karena itu, ikhtiar pelestarian tradisi atau budaya yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal patut diapresiasi. TI, seorang tokoh masyarakat setempat memberikan pandangannya sebagai berikut:

“Tradisi atawa budaya lokal te awi uluh itah di jaman utuh te tukep terlupakan huang uluh are te. Oleh sebab itu te mahilup hindai tradisi atawa budaya uluh itah te penting. Paling jida uluh are utuh te tahu lawan tradisinya uluh batuh. Manyanggar te salah ije budaya itah yang je tahi jidada tehining lawan diawi oleh uluh itah samandeyahe. Menurut iki lah tradisi tuh diawi oleh tege inisiatif matan uluh are te lewat dewan adat dayak.”

“Tradisi atau budaya lokal bagi masyarakat di jaman sekarang tampaknya hampir terlupakan seiring perubahan cara pandang masyarakatnya. Oleh karena itu, upaya melestarikan kembali

tradisi atau budaya lokal dipandang penting. Setidaknya masyarakat era sekarang mengenal tradisi leluhur nenek moyangnya. Manyanggar merupakan salah satu tradisi atau budaya lokal yang hampir tidak terdengar dan dilaksanakan lagi setelah puluhan tahun. Sepengetahuan saya setahun lalu tradisi ini mulai diselenggarakan karena memang ada inisiatif dari masyarakat sendiri melalui Dewan Adat Dayak.” (Wawancara, 25 Juni 2018)

Pentingnya pelestarian budaya lokal seperti manyanggar di tengah cepatnya perubahan sosial juga dikemukakan oleh Mu, pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten. Ia mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

“DAD lawan uluh are tuh berinisiatif handk meawi tradisi manyanggar te. Tradisi tuh hampir nihau. Jadi dengan meawi tradisi manyanggar tuh merupakan upaya gasan maingate lawan mahilung pentinya tradisi atawa budaya uluh itah kia. Nah pemerintah kabupaten itah, kilau bupati mandukung samandeyaha.”

“DAD dan masyarakat memang berinisiatif untuk menyelenggarakan tradisi manyanggar. Tradisi ini terus terang hampir terlupakan. Jadi dengan penyelenggaraan manyanggar ini sebenarnya merupakan upaya untuk mengingatkan sekaligus melestarikan pentingnya tradisi atau budaya lokal. Kebetulan juga pemerintah kabupaten, dalam hal ini, Bupati, mendukung sepenuhnya.” (Wawancara, 29 Juli 2018)

Bagi masyarakat Dayak di Muara Teweh, menjunjung tinggi tradisi atau budaya lokal merupakan panggilan hati sebagai bentuk menghormati warisan leluhur. Oleh karena itu, pelestarian tradisi atau budaya setempat merupakan upaya nyata untuk terus menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Hal itu pun ditegaskan oleh salah seorang damang Desa Hajak, EG. Ia mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Perubahan lawan kemajuan te dasare jida kawa dihindari. Itah kia pasti mehalaw lawan supa. Hanya itah kia jida boleh nararainye, terlena lawan kemajuan-kemajuan zaman awen utuh, apalagi malupakan tradisi atawa budaya ji dihilup leluhur itah. Manggaduh lawan mahilup budaya te je penting. Kilau kueh pun si huang

budaya te uras tege nilai-nilai luhur dalam kehidupan itah. Budaya manyanggar te tradisi ji menurut yaku penting gasan dihilup. Karena si huang te tege nilai-nilai spiritual lawan nilai kemanusiaan.”

“Perubahan dan kemajuan jaman pada dasarnya memang tidak bisa dihindari. Kita semua pasti menghadapinya. Hanya saja, kita juga tidak boleh terlena dengan kemajuan-kemajuan yang dihasilkan dari perubahan jaman tersebut, apalagi sampai melupakan tradisi atau budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Menjaga dan merawat tradisi atau budaya lokal semestinya menjadi kesadaran bersama. Bagaimanapun kita hidup dengan nilai-nilai luhur yang sebenarnya sarat dengan makna hidup. Manyanggar sebagai sebuah tradisi atau budaya lokal menurut saya pribadi juga penting untuk dilestarikan. Sebab di dalamnya ada nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan.” (Wawancara, 15 September 2018)

Sejumlah informan lain secara umum juga berpandangan sama bahwa tradisi atau budaya lokal pada dasarnya penting untuk dilestarikan meskipun kehidupan manusia terus berubah dan berkembang maju. Merawat tradisi atau budaya lokal dalam pandangan para informan merupakan bentuk apresiasi terhadap warisan para leluhur.

Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya bagaimanapun sebenarnya masih relevan dengan kehidupan manusia yang terus berubah cepat dengan segala kompleksitas permasalahannya. Dalam konteks tradisi manyanggar ini, masyarakat Dayak di Daerah Aliran Sungai Barito, khususnya di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara memandangnya sebagai kekayaan budaya yang layak untuk terus dilestarikan.

Ju, seorang warga setempat dan berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Barito Utara, ketika diwawancarai mengemukakan bahwa tradisi atau budaya lokal dalam hal-hal tertentu tetap penting dilestarikan, meskipun menurutnya dalam kehidupan seperti sekarang ini, sebagian besar masyarakat tidak terlalu peduli dengan tradisi atau budaya lokalnya karena mereka telah terpengaruh beragam faktor eksternal seperti teknologi, *beliefs* (kepercayaan dan keyakinan), dan perubahan cara berpikir. Ia mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

“Uluh etnik atawa suku te beisi kekayaan budaya atawa tradisi masing-masing, kilau itah dayak. Tradisi atau budaya te dialang

bahalap oleh uluh are te semestinya dihilup beh. Tapi zaman utuh te are uluh je jidada mealang tradisi atawa budaya tuh kilau sesuatu je penting bagi itah. Pengaruh dunia si kanih te lawan tege teknologi kia yang memengaruhi je malang uluh itah te lawan tradisi atau budaya itah te.”

“Setiap kelompok etnik atau suku memiliki kekayaan budaya atau tradisinya sendiri, termasuk etnik Dayak. Tradisi atau budaya itu sepanjang dipandang baik bagi masyarakatnya semestinya tetap dilestarikan. Hanya saja jaman sekarang banyak orang tidak terlalu melihat tradisi atau budaya sebagai sesuatu yang dianggap penting. Pengaruh dunia luar dan kehadiran teknologi juga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap tradisi atau budaya lokalnya sendiri.” (Wawancara, 25 Juni 2018)

Pandangan berbeda justru dikemukakan oleh salah seorang agamawan, AG. Menurutnya, tradisi atau budaya lokal yang sarat dengan kesyirikan tidak layak atau tidak sepatutnya dilestarikan. Sebab hal itu hanya akan merusak akidah umat Islam. Secara gamblang ia mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Andau tuh itah jidada dimintai gasan tame prosesi tradisi manyanggar te. Jadi kejau tu itah ketahui te, tradisi te kejau manan nilai islam, bahkan tukep lawan kesyirikan. Lawan itah ni wajib uras mengetawani uluh are te atawa umat islam si wiliayah itah te ela menggau atawa mehapa tradisi manyanggar tuh. Agar akidah te jida tecampur lawan hal kesyirikan. Beken kilau budaya te si huange tege nilai keislaman”

“Sejauh ini kami tidak pernah diminta atau diundang untuk mengikuti prosesi tradisi manyanggar. Jadi sejauh yang kami ketahui tradisi tersebut memang jauh dari nilai-nilai keislaman dan bahkan mengarah ke perilaku syirik. Dan kami berkewajiban mengingatkan kepada umat Islam di daerah ini untuk tidak melaksanakan atau mengikuti prosesi tersebut. Tujuannya agar akidahnya tidak tercampur dengan hal-hal yang bernuansa kesyirikan. Lain halnya jika tradisi tersebut memuat unsur-unsur keislaman di dalamnya.” (Wawancara, 24 Juni 2018)

Apa yang dikemukakan oleh AG menggambarkan bahwa antara agama (Islam) dan budaya lokal dipandang tidak dapat disandingkan jika tradisi

atau budaya tersebut sama sekali tidak mengandung nilai-nilai keislaman. Namun demikian, masyarakat Dayak yang menganut kepercayaan atau agama selain Islam tentu saja memiliki caranya sendiri dalam melihat dan memperlakukan sebuah tradisi atau budaya.

Pandangan tentang pentingnya pelestarian tradisi atau budaya lokal juga diungkapkan oleh Gn, seorang aparat penegak hukum di Polsek Teweh Tengah. Ia sendiri bukanlah seorang beretnik Dayak, namun bersuku Jawa. Tim peneliti mewawancarai yang bersangkutan karena berdasarkan informasi dari masyarakat terjadi konflik warga di wilayah Kecamatan Teweh Tengah. Pandangannya tentang pentingnya pelestarian tradisi atau budaya lokal juga tidak lepas dari pengalamannya selama ini tinggal dan berinteraksi dengan warga etnik Dayak. Ia mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

“Pada dasarnya setiap suku bangsa memiliki tradisi atau budaya lokalnya sendiri. Misal masyarakat Jawa (kebetulan saya bersuku Jawa) memiliki banyak tradisi atau budaya lokal yang sampai hari ini masih dilestarikan. Sama halnya dengan suku Jawa, menurut saya, etnik Dayak pun memiliki banyak tradisi atau budaya lokalnya yang sampai hari ini masih dilestarikan oleh mereka. Hal itu saya ketahui dan melihat secara langsung selama saya hidup, tinggal, dan berinteraksi dengan mereka. Bahkan dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang tenang dan harmonis, saya sering kali berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para tokoh adat setempat. Jadi tradisi atau budaya lokal dalam pandangan saya penting untuk terus dilestarikan.” (Wawancara, 14 September 2018).

Pandangan atau pendapat dari sejumlah informan dengan pelbagai latar belakangnya menunjukkan dan menggambarkan secara jelas bahwa secara umum mereka menilai pelestarian budaya atau tradisi lokal sebagai bentuk kearifan lokal adalah penting. Perubahan jaman yang terjadi semestinya bukan menjadi alasan untuk meninggalkan kekayaan budaya lokal mereka sendiri. Justru kearifan lokal tersebut semestinya dipertahankan dan juga dikenalkan kepada generasi mudanya. Setidaknya nilai-nilai dan pengetahuan lokal yang terkandung dalam tradisi atau budaya lokal tersebut dapat diperkenalkan dan dipahami.

MANYANGGAR SEBAGAI MEDIA RESOLUSI KONFLIK

Setiap komunitas masyarakat selalu memiliki potensi konflik. Konflik terjadi karena terdapat dua pihak yang bertikai. Konflik juga terjadi akibat terjadinya perbedaan kepentingan di antara komunitas masyarakat. Dalam banyak peristiwa konflik, penyelesaian konflik tidak bisa terpisahkan dari rekonsiliasi karena rekonsiliasi sendiri merupakan salah satu tahap resolusi konflik, yaitu *peace building*.

Rekonsiliasi sendiri merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.

Menurut Ralf Dahrendrof, penyelesaian konflik yang efektif sangat bergantung pada tiga faktor. *Pertama*, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik di antara mereka. *Kedua*, kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisir sehingga masing-masing pihak memahami tuntutan pihak lain. *Ketiga*, kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dalam hubungan interaksi di antara mereka.

Setiap budaya pada dasarnya memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk di dalamnya kearifan dalam menyelesaikan konflik. Hal ini pula yang tercermin dalam tradisi manyanggar. Tradisi ini bagi masyarakat di Daerah Aliran Sungai Barito pun menjadi media resolusi konflik yang efektif.

Masyarakat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Muara Teweh merupakan masyarakat yang pluralistik atau heterogen baik etnik, bahasa, ras, maupun agama. Realitas keberagaman masyarakat di Daerah Aliran Sungai Barito tentunya juga memiliki potensi konflik yang dapat muncul kapan saja dan di mana saja dengan motif apa pun. Dalam konteks penyelesaian konflik sosial tersebut, pendekatan melalui tradisi atau budaya lokal dipandang penting. Hal itu dikemukakan oleh Zr, seorang budayawan setempat. Ia mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

“Konflik si masyarakat te mun jadi te hampareya hindai lawan sikueh beh. Andau tuh konflik si masyarakat te, kilau konflik antar uluh are te jadi selesai mehapa pendekatan tradisi atau adat. Nah, biasanya te pendekatan budaya te je dihapa uluh are, kecuali kilau budaya te jida kawa menyelesaikan, hanyar mehapa hukum je berlaku.”

“Konflik di masyarakat memang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Selama ini jika terjadi konflik di masyarakat misalnya konflik antarwarga, cara menyelesaikannya bisa dengan pendekatan tradisi atau adat. Jadi biasanya pendekatan budaya lebih dikedepankan terlebih dulu daripada pendekatan hukum. Kecuali kalau pendekatan adat tidak bisa menyelesaikan, baru biasanya diserahkan melalui pendekatan hukum.” (Wawancara, 23 Juni 2018)

Apa yang dikemukakan oleh Zr senada dengan apa yang dikemukakan oleh R, seorang warga lokal yang berprofesi sebagai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Utara dan kebetulan juga sebagai menantu Zr. Ia mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

“Menurut itah tradisi manyanggar tuh kilau bentuk kearifan lokal kawa diawi gasan sarana mehapa konflik si uluh are. Sebab tradisi tuh huange interaksi sosial uluh-uluh matan macam-macam atawa suku uras, lwan agama. Tradisi tuh kawa dihapa gasan memperkuat kerukunan atawa persaudaraan.”

“Menurut Saya, tradisi manyanggar sebagai bentuk kearifan lokal memang dapat digunakan sebagai sarana atau media untuk menyelesaikan konflik di masyarakat. Sebab tradisi ini dalam praktiknya memberikan ruang terjadinya interaksi sosial antarindividu dari berbagai suku dan agama sehingga tradisi ini bisa memperkuat atau mempererat kerukunan atau persaudaraan.” (Wawancara, 24 Juni 2018).

Hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh R juga dikemukakan oleh JS, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Barito Utara dan juga mantan birokrat di pemerintahan Kabupaten Barito Utara. Ia menjelaskan pandangannya sebagai berikut:

“Uluh are si wilayah tuh, pasti tege potensi konflik. Wayah tuh jika tege konflik si uluh are, itah tuh manyarankan jika bisa mehapa

lawan pendekatan budaya uluh itah kia dari pada meawai jalur hukum formal. Manyanggar tuh kawa diawikan sebagai sarana resolusi konflik.”

“Masyarakat di wilayah ini secara umum heterogen. Dan potensi konflik pun pasti ada. Selama ini jika terjadi konflik di masyarakat, kami selalu menyarankan agar terlebih dulu diselesaikan dengan pendekatan budaya lokal sebagai bentuk kearifan lokal daripada penyelesaian melalui jalur hukum formal. Tradisi manyanggar pun kami jadikan sebagai sarana resolusi konflik.” (Wawancara, 30 Juli 2018)

Pentingnya penyelesaian konflik sosial dengan pendekatan tradisi atau budaya lokal juga dikemukakan oleh EG, seorang damang di Desa Hajak. Ia mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

“Andau tuh kehidupan uluh are si kantuh te aman-aman beh. Kalau tege konflik ji serius te si uleh are, uleh are te biasanya mehapa pendekatan budaya itah gasan menyelesaikan konflik te. Konflik te tege tidak diselesaikan hanya mehapa hukum polisi. Tege dewan adat te penting gasan ji mehapa lawan mahilup tradisi lokal itah.”

“Selama ini kehidupan masyarakat di sini sebenarnya aman-aman saja. Kalau terjadi konflik yang serius di masyarakat biasanya terlebih dulu kami upayakan penyelesaiannya dengan pendekatan budaya lokal atau pendekatan adat. Jadi konflik yang terjadi tidak secara serta merta diselesaikan dengan pendekatan hukum formal. Keberadaan Dewan Adat setelah dilembagakan juga cukup penting perannya dalam turut serta merawat atau melestarikan tradisi atau budaya lokal. (Wawancara, 15 September 2018).

Pentingnya upaya penyelesaian konflik sosial dengan pendekatan budaya lokal juga dikemukakan oleh Gn, Kanit Bimas Polsek Teweh Tengah. Selama pengalamannya bertugas di wilayah Kabupaten Barito Utara sebagai seorang aparat penegak hukum, ia mengalami dan merasakan beberapa konflik yang pernah terjadi di daerah Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan pengalamannya, konflik tersebut bisa diselesaikan melalui pendekatan budaya. Menurutnya, pendekatan budaya memang dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian konflik. Ia mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

“Kami dari pihak kepolisian sejauh ini apabila terjadi konflik di masyarakat juga tidak secara langsung diselesaikan dengan pendekatan hukum. Justru biasanya kami juga lebih banyak berkoordinasi dengan tokoh-tokoh adat (DAD) dalam menyikapi masalah-masalah masyarakat seperti konflik. Pihak kepolisian dan Dewan Adat memiliki kesepahaman dan komitmen bersama bahwa penyelesaian konflik di masyarakat bisa mendahulukan pendekatan budaya atau adat daripada pendekatan hukum positif. Sebab pendekatan hukum positif semata juga tidak serta merta dapat menyelesaikan konflik di masyarakat. (Wawancara, 14 September 2018).

Potensi terjadinya konflik sosial di Indonesia memang cukup besar dan bisa muncul kapan pun dan di mana pun. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa keragaman atau pluralitas penduduk Indonesia sendiri. Mengingat konflik sosial selalu berdampak secara serius terhadap psikologi atau pun fisik dan material, pemerintah memandang penting untuk membuat payung hukum tentang penanganan konflik sosial. Payung hukum dimaksud adalah UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang tersebut secara eksplisit juga memberikan ruang bagi kearifan lokal untuk dilestarikan termasuk dalam upaya menyelesaikan konflik sosial yang terjadi. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya juga memberikan atensi atau perhatian tersendiri terhadap pentingnya pelestarian budaya lokal sebagai bagian penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial.

Hal itu juga dinyatakan oleh Nd, Bupati Kabupaten Barito Utara. Menurutnya, pemerintah daerah selama ini selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kehidupan sosial yang harmonis dengan segala keberagaman yang ada. Kalau pun terjadi konflik di masyarakat, maka upaya penyelesaiannya tidak selalu dengan pendekatan hukum positif, namun juga mengupayakannya melalui pendekatan budaya. Dalam pandangannya, penyelesaian konflik melalui pendekatan budaya lokal juga dirasakan jauh lebih efektif. Secara jelas ia mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

“Andau utuh pemerintah daerah selalu maingatkan uluh are samandeyahe gasan manjaga lawan mahanggap kehidupan sosial uras agar selalu harmonis lawan keberagaman uluh are samandeyahe.

Konflik si masyarakat te itah upayakan penyelesaiannya mehapa pendekatan budaya itah. Si daerah itah tuh tensi ketegangan konflik jidada signifikan, meski itah te manyadari kia potensi-potensi konflik te tege hamparaya bila”

“Sejauh ini pemerintah daerah selalu mengingatkan kepada warga masyarakat untuk senantiasa menjaga dan menciptakan kehidupan sosial yang rukun dan harmonis dengan segala keberagaman yang ada. Konflik yang terjadi di masyarakat kita upayakan penyelesaiannya juga melalui pendekatan budaya. Di daerah kita tensi ketegangan dan konflik di masyarakat cenderung tidak ada secara signifikan, meskipun kita juga menyadari sekaligus mengantisipasi potensi-potensi konflik yang dapat muncul kapan saja.” (Wawancara, 31 Juli 2018).

Pendekatan budaya atau adat dalam menyelesaikan konflik di masyarakat dipandang penting juga dikemukakan oleh salah seorang anggota FKUB Kabupaten Barito Utara, SY. Menurutnya realitas keberagaman merupakan sesuatu yang terberi (*given*) dan tidak bisa ditolak. Sikap terhadap realitas keberagaman itulah yang semestinya dikedepankan secara arif dan bijak.

Realitas keberagaman dengan segala aspeknya, menurutnya juga merupakan potensi konflik tersendiri. Kalaupun misal terjadi konflik di masyarakat maka cara penyelesaiannya bisa dengan banyak cara, salah satunya melalui pendekatan budaya lokal. Secara jelas ia mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

“Menggau belum sosial je pluralistik te kilau uluh are si wilayah tertentu te tanggung jawab itah, tanggung jawab uras. Kalau terjadi konflik si uluh are maka harus tege penyelesaian te. Manurut ikiy, meawi budaya atawa adat dalam menyelesaikan konflik te penting gasan di utamakan. Penyelesaian konflik te jidada harus kilau dengan hukum beh, beken kilau te. Dasare te uluh are tuh kawa maharagu lawan cara itah kia dengan meawi budaya itah tuh.”

“Menciptakan kehidupan sosial yang pluralistik seperti masyarakat di wilayah ini tentu merupakan tanggung jawab bersama. Jika terjadi konflik di masyarakat, maka perlu ada upaya penyelesaiannya. Menurut saya, pendekatan budaya atau adat dalam menyelesaikan konflik juga penting untuk diutamakan

atau dikedepankan. Penyelesaian konflik tidak harus selalu dengan pendekatan hukum positif. Sebab pada dasarnya setiap masyarakat memiliki caranya sendiri dalam menyelesaikan konflik yang lazimnya bersumber dari kearifan lokal setempat.” (Wawancara, 25 Juni 2018)

Pada dasarnya pendekatan budaya atau adat-tradisi memang dapat dijadikan sebagai instrumen penyelesaian konflik. Sepanjang tradisi atau budaya lokal tersebut efektif dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, maka pendekatan hukum tidak mutlak digunakan. Hal itu dikemukakan oleh salah seorang tokoh masyarakat setempat TI. Dengan jelas ia menyatakan pandangannya sebagai berikut:

“Konflik sosial te kilau gatah. Dalam arti hamapaya kawa terjadi, sikueh beh kawa. Menggau atawa meawi pendekatan budaya te manurut itah te panting kia dalam menyelesaikan konflik si uluh are tuh. Apalagi si uluh itah te (dayak) tege budaya itah yang kawa digau lawan diawi gasan menyelesaikan konflik.”

“Konflik sosial memang sesuatu yang bersifat laten. Dalam arti bisa terjadi kapan pun dan di mana pun. Pendekatan budaya menurut saya juga penting dan cukup efektif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Apalagi masyarakat Dayak memiliki kearifan lokal sendiri yang dapat dijadikan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik.” (Wawancara, 25 Juni 2018)

Hal senada juga dikemukakan oleh Mu, pengurus DAD Kabupaten Barito Utara. Ia menjelaskan bahwa budaya lokal yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal sudah semestinya lebih dikedepankan dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Dalam konteks ini, Dewan Adat Dayak (DAD) sendiri selalu mendorong dan mengingatkan akan arti pentingnya budaya atau tradisi lokal dikedepankan sebagai sarana atau model penyelesaian konflik. Ia mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Kalau itah dewan adat dayak te, biasanya menggau gasan meawi pendekatan budaya gasan menyelesaikan konflik si uleh are tuh. Ni kilau fungsi dewan adat dayak si hituh.”

“Kalau kita dari Dewan Adat Dayak, biasanya menginisiasi untuk menggunakan pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik

di masyarakat. Ini merupakan fungsi yang bisa diperankan oleh Dewan Adat Dayak.” (Wawancara, 29 Juli 2018)

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh pengurus DAD, Kd, seorang ketua RT setempat, juga berpendapat bahwa konflik dapat diselesaikan melalui pendekatan tradisi atau budaya lokal. Menurutnya, masyarakat terutama etnik Dayak sendiri memiliki kekayaan budaya atau tradisi yang bisa digunakan dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Ia menyatakan secara gamblang terkait hal itu sebagai berikut:

“Misal, kalau tege konflik uleh itah, itah te berusaha mahanggap dengan cara itah kia, kekeluargaan atawa pendekatan budaya. Prinsip itah te hapakat gasan mandahulukan pendekatan budaya dari pada hukum polisi te. Tapi hukum polisi te digau lawan diawi tergantung beh, kalau konflik ji hai.”

“Kalau misal ada terjadi konflik warga, kita tentu berusaha turut membantu menyelesaikan dengan cara kekeluargaan atau pendekatan adat atau budaya. Pada prinsipnya kita lebih mendahulukan pendekatan kekeluargaan atau budaya daripada pendekatan hukum positif. Pendekatan dengan jalur hukum positif sebenarnya juga tergantung dari skala dan bentuk konfliknya sendiri.” (Wawancara, 29 Juli 2018)

Jika pendekatan budaya lebih bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, maka pendekatan aparat penegak hukum (polisi) tidak mutlak dilakukan. Hal itu dikemukakan oleh SR, seorang warga setempat, ketika ia ditanya pendapatnya tentang seberapa penting dan efektifkah pendekatan budaya atau adat dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Ia mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Andau tuh sepengatuah itah te kalau tege konflik si uluh are te biasanya hapakat uluh itah te menggau lawan meawi pendekatan keluarga atawa pendekatan budaya beh. Itu sudah cukup beh ampie.”

“Selama ini sejauh yang saya ketahui jika terjadi konflik warga ya biasanya diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan atau pendekatan budaya. Dan hal itu memang penting dan cukup efektif.” (Wawancara, 29 Juli 2018)

Pendapat yang tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh SR juga dikemukakan oleh Ju, seorang perempuan etnik Dayak dan bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di pemerintah Kabupaten Barito Utara. Ia mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

“Itah suku dayak te memang empui budaya itah gasan penyelesaian konflik si uluh are atau uluh itah te. Biasanya menggau lawan meawi pendekatan kekeluargaan atawa budaya lokal itah kia. Itu sudah cukup beh ampie menggau atawa meawi gasan penyelesaian konflik uluh uras samandiyahé”

“Kami sebagai etnik Dayak, memang memiliki kearifan lokal sendiri dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Dan biasanya cara penyelesaiannya dengan pendekatan kekeluargaan atau budaya (adat). Pendekatan budaya selama ini memang diakui lebih efektif untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.” (Wawancara, 25 Juni 2018)

Salah seorang warga yang anggota keluarganya pernah mengalami konflik dengan warga setempat, SN, kebetulan ia adalah warga etnik Bugis, juga memberikan penjelasan bahwa konflik dapat diselesaikan baik melalui jalur hukum maupun pendekatan kekeluargaan atau budaya. Ia mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

“Sepengalaman Saya dan keluarga, konflik yang terjadi ya bisa diselesaikan dengan jalur hukum (pengadilan) dan jalur kekeluargaan. Kebetulan kami berasal dari etnik Bugis dan beberapa waktu lalu terjadi peristiwa kriminal yang menyebabkan salah seorang anggota keluarga kami menjadi korban dan meninggal. Kami sendiri pada prinsipnya ingin hidup harmonis dan kami juga paham tentang falsafah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi peristiwa itu diselesaikan tidak hanya melalui jalur hukum, tetapi juga pendekatan kekeluargaan untuk saling bermaafan tanpa ada rasa benci dan dendam.” (Wawancara, 15 September 2018)

Secara umum tradisi atau budaya lokal yang memuat nilai-nilai kearifan lokal memang dapat menjadi instrumen penyelesaian konflik. Dalam banyak kasus, konflik sosial yang terjadi dapat diredam atau diselesaikan dengan baik tanpa harus melalui pendekatan jalur hukum

positif semata. Penegakan hukum dalam penyelesaian konflik sebenarnya juga tidak menjadi garansi bagi terwujudnya keharmonisan kehidupan sosial.

MANYANGGAR: KOMUNIKASI SIMBOLIK DAN REPRESENTASI MAKNA

Manyanggar sebagai salah satu wujud budaya lokal masyarakat Dayak di Daerah Aliran Sungai Barito, Muara Teweh tentu mengandung nilai-nilai atau falsafah hidup. Ia bukan sekadar praktik budaya yang kering dan hampa dari nilai-nilai atau falsafah hidup. Dalam praktik budaya manyanggar sesungguhnya terjadi proses atau tindakan komunikasi baik bersifat simbolik maupun komunikasi interpersonal.

Komunikasi simbolik yang tercermin dalam praktik budaya manyanggar sebagai medium resolusi konflik tentunya memuat pesan-pesan tertentu di mana pesan-pesan tersebut diinterpretasi atau dimaknai oleh para aktor (pelaku) sesuai dengan *field of reference* (bidang acuan) seperti lingkungan, pendidikan, otoritas, dan pengalaman.

Zr, seorang budayawan setempat, mengemukakan bahwa tradisi manyanggar merupakan tradisi yang sarat atau kaya makna di dalamnya. Ia menjelaskan bahwa sebelum praktik budaya tersebut dilaksanakan harus ada persiapan-persiapan khusus semisal ragam makanan yang disediakan di mana makanan-makanan tersebut tidak asal makanan. Bahkan untuk memperoleh dan membuat makanan-makanan tersebut juga dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu bagi yang membuat atau menyiapkannya.

“Tradisi manyanggar tuh tradisi batuh nenek moyang. Akan meawi menyaggar tuh tege alasan-alasan tertentu. Sebelum meawi acara manyanggar tuh, tege ji persiapan-persiapan khusus kilau jenis kumanan ji wajin disediakan. Hanya uluh tertentu beh ji bisa mewai kumanan tuh. Tradisi tuh tege nilai-nilai tertentu ji harus dipahami.”

“Tradisi manyanggar ini sebenarnya tradisi lama nenek moyang yang turun temurun sifatnya. Untuk menyelenggarakannya biasanya ada alasan-alasan tertentu. Bahkan sebelum tradisi ini dilaksanakan, harus ada persiapan-persiapan khusus semisal dari jenis makanan yang harus disediakan, persyaratan tertentu orang yang membuat atau menyiapkan makanan-makanan tersebut.

Dengan kata lain, tradisi ini memiliki nilai-nilai atau makna tertentu yang harus dipahami.” (Wawancara, 23 Juni 2018).

Pemaknaan terhadap tradisi manyanggar sebagai kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai luhur juga dikemukakan oleh JS, Ketua Dewan Adat Dayak. Ia berpandangan bahwa tradisi manyanggar bisa dimaknai sebagai bentuk perekat sosial dengan beragam latar belakang sosialnya. Ada proses komunikasi sosial dan simbolik yang ada dalam tradisi manyanggar ini. Dengan jelas ia mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

“Sebelum manyanggar tuh dilaksanakan, itah mengundang pihak ji bekonflik akan rekonsiliasi dengan ikhlas. Beken rekonsiasi te, maka mahapa budaya manyanggar hindau kawa diawi. Jadi tradisi budaya tuh lah dihapa uluh are sebagai media komunikasi lawan penyelesaian konflik ji mehapa budaya itah.”

“Sebelum tradisi manyanggar ini dilaksanakan, kami biasanya mengundang para pihak yang berkonflik untuk rekonsiliasi dengan ikhlas. Tanpa adanya rekonsiliasi terlebih dulu, maka praktik budaya manyanggar belum bisa dilaksanakan. Jadi tradisi budaya ini bisa dimaknai sebagai medium komunikasi sosial sekaligus juga resolusi konflik.” (Wawancara, 30 Juli 2018).

SR, seorang pelaku tradisi, berpandangan bahwa tradisi atau budaya manyanggar penting untuk dilestarikan oleh masyarakat. Menurutnya, dampak atau hikmah di balik tradisi ini sebenarnya kembalinya ke masyarakat sendiri. Sepanjang pengalaman dirinya sebagai salah satu pelaku budaya, dengan tradisi manyanggar ini, ia memercayai kejahatan atau musibah dan konflik atau pertikaian tidak terjadi. Masyarakat pun dalam berkehidupan sehari-hari jadi merasa aman dan tenang. Ia mengemukakan sebagai berikut:

“Manyanggar te penting diawi lawan dihilup. Sebab tege kebagiakan si suang budaya itah te ji rasakan oleh uluh are, kilau lingkungan atawa wilayah te jadi aman, beken musibah ji duan, beken kia kejahatan ji dumah. Hanya uluh are te mempecaiyainya. Hapander masalah keimanan uluh te terutama bagi uluh je muslim”

“Sebenarnya penting juga tradisi manyanggar ini dilestarikan. Sebab ada kebaikan yang dirasakan oleh masyarakat setelah tradisi ini diselenggarakan seperti lingkungan atau wilayah

menjadi aman, tidak terjadi musibah atau kejahatan. Hanya saja tidak semua orang memercayai hal seperti itu. Biasanya menyangkut keimanan seseorang, terutama bagi mereka yang beragama Islam.” (Wawancara, 29 Juli 2018).

Pemaknaan lain diungkapkan oleh R, selain sebagai menantu Zr, ia juga berprofesi sebagai ASN Pemkab, yang biasa membantu menyiapkan segala sesuatunya untuk penyelenggaraan tradisi manyanggar. Ia mengemukakan sebagai berikut:

“Tradisi manyanggar tuh si suange are maknae te, kilau pentingnya itah te menjaga persaudaraan lawan kebersamaan. Nah si huang manyanggar te tercermin persiapan meawi yang si huange te malibatkan uluh are, kilau membaur samandeyahe jadi ije.”

“Tradisi manyanggar itu dalam prosesinya mengandung banyak makna. Salah satunya adalah pentingnya untuk menjaga persaudaraan dan kebersamaan apa pun latar belakangnya. Hal ini tercermin dari persiapan dan pelaksanaan yang melibatkan banyak orang. Mereka membaur jadi satu.” (Wawancara, 23 Juni 2018)

Sebagai seorang etnik Dayak dan dipercaya sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten dan pernah menjadi birokrat di pemerintah kabupaten, JS, memiliki pemaknaan sendiri terhadap tradisi manyanggar. Ia ketika diwawancarai memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kalau ike te memaknai tradisi manyanggar tuh macam wujud itah atas menggau ampun atas dosa yang itah samandeyahe lakukan, kilau itah te berbuat baik lwan alam, gotong royong. Jadi tradisi tuh are makna si huang te, are nilai-nilai luhur.”

“Kalau saya memaknai tradisi manyanggar salah satunya adalah wujud permohonan ampun atas dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan selama ini, berbuat baik dengan alam sekitar, gotong royong. Jadi tradisi ini sesungguhnya sarat makna dan nilai-nilai luhur di dalamnya.” (Wawancara, 30 Juli 2018)

Sementara itu, SR, seorang ibu rumah tangga, memberikan pemaknaannya sendiri sesuai dengan pengalaman hidup yang pernah dialaminya selama ini. Ketika diwawancarai oleh tim peneliti, ia

memberikan penjelasan sekaligus menceritakan pengalamannya tentang peristiwa “gaib” yang dialaminya waktu masih remaja. Ia memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Manyanggar tuh kawa dimaknai kilau bentuk itah mewujudkan hubungan antar sesama itah lawan makhluk lain samandeyahe. Jida boleh je mengganggu. Nah itu pengalaman iki selama mehapa lawan umpat manyanggar te.”

“Manyanggar itu bisa dimaknai sebagai bentuk mewujudkan hubungan saling pengertian dan menghormati antarmakhluk. Tidak boleh saling mengganggu. Hal-hal seperti itu yang bisa saya maknai dari pengalaman hidup saya selama ini.” (Wawancara, 29 Juli 2018)

Hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh SR juga dikemukakan oleh Er. Ia seorang ibu rumah tangga dan tinggal di dekat lokasi penyelenggaraan manyanggar, meskipun ia sendiri tidak pernah mengalami peristiwa “gaib” sebagaimana yang dialami oleh SR. Ia memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Ikiy memaknai manyanggar tuh kilau cara belaku ijin lawan makhluk je tege si alam slain itah. Kilau itah handak menggau jalan hanyar tau parumahan hanyar. Kita te sebagai manusia semanya itah beh, jidada belaku ijin kilau handak menggau jalan hanyar tau parumahan hanyar. Si hite te tege makhluk je terganggu oleh itah. Olehnya te manyanggar tuh bisa dimaknai kilau etika itah kepada lingkungan.”

“Saya memaknai manyanggar sebagai cara meminta izin kepada makhluk penghuni alam lain ketika kita misal mau membuka lahan baru atau pemukiman. Sering kali kita sebagai manusia semanya sendiri tanpa ada permisi terlebih dulu ketika misal akan membuka lahan atau membuka pemukiman baru. Padahal di situ ada makhluk lain yang bisa jadi merasa terganggu. Oleh karena itu, manyanggar bisa juga dimaknai sebagai wujud etika kepada lingkungan.” (Wawancara, 29 Juli 2018)

Tradisi manyanggar sebagai salah satu budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat etnik Dayak juga dimaknai tersendiri oleh Nd, Bupati Kabupaten Barito Utara. Sebagai seorang etnik Dayak, ia mengemukakan

pemaknaannya terhadap tradisi manyanggar. Penjelasannya sebagai berikut:

“Memaknai manyanggar te uluh uras te beda-beda, kilau itah te manyanggar te tau dimaknai bentuk proses tolak bawa atawa memapas lewu agar itah te belum merasa tenang lawan tentram. Uluh are te pasti maharap belum je baik atawa tenang uras.”

“Memaknai tradisi manyanggar setiap orang pastinya berbeda. Kalau saya manyanggar itu ya bisa dimaknai sebagai bentuk proses tolak bala agar kehidupan kita terasa tenang dan tentram. Setiap orang pastinya akan selalu berharap kehidupannya baik dan tenang.” (Wawancara, 31 Juli 2018)

Bagi seorang Ju, seorang etnik Dayak dan bekerja sebagai ASN di Pemkab Barito Utara, tradisi manyanggar dimaknai sebagai semangat menjalin persaudaraan dengan siapa saja. Baginya, hidup bersama itu saling berbagi dan mengedepankan keselamatan bersama. Ia mengemukakan sebagai berikut:

“Si huang manyanggar te are simbol je tau dimaknai, kilau hidup lawan perbedaan te beken bermusuhan antara itah, tapi saling menghargai lawan berbagi sesama itah, karena itah te hakikatnya bersaudara. Nah itu si huang manyanggar te tege makna kilau te, menurut iki.”

“Dalam manyanggar itu ada banyak simbol yang bisa dimaknai. Misal, hidup dengan perbedaan itu bukan untuk saling meniadakan, namun saling menghargai dan saling berbagi dengan penuh rasa persaudaraan. Itu tercermin dari prosesi manyanggar yang saya ketahui selama ini.” (Wawancara, 25 Juni 2018)

Penyelenggaraan tradisi manyanggar pada dasarnya merupakan inisiatif dan kemauan masyarakat sendiri. Oleh karena itu, dalam persiapan dan pelaksanaannya melibatkan banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi manyanggar juga mengandung semangat saling membantu dan bekerja sama demi tujuan bersama. Setidaknya hal itu-lah yang dimaknai oleh Kd, seorang Ketua RT setempat yang kebetulan daerahnya dijadikan lokasi penyelenggaraan manyanggar selama beberapa hari. Dengan gamblang ia mengemukakan sebagai berikut:

“Ikiy memaknai manyanggar tuh sederhana beh, si huang tradisi tuh itah diajari saling menduhup menggilau bekerja sama dalam ije tujuan, manyanggar te diawi agar lingkungan te aman lawan tantram. Kilau te dipelukun saling menduhup antar sesama uleh are.”

“Kalau Saya memaknai tradisi manyanggar ya sederhana saja. Dalam tradisi ini kita diajarkan untuk saling membantu dan bekerja sama dalam mewujudkan tujuan. Manyanggar dilakukan kan agar lingkungan atau wilayah yang kita diami menjadi aman dan tentram. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama bersama.” (Wawancara, 29 Juli 2018)

Kehidupan manusia dari awal tidak pernah diciptakan sama oleh Tuhan YME. Oleh karena itu, realitas perbedaan merupakan sesuatu yang terberi (*given*) dan dibutuhkan sikap dan semangat untuk saling menghargai dan menghormati antarsesama dengan segala perbedaan yang ada. Hal itu dikemukakan oleh SY, seorang pengurus FKUB Kabupaten, ketika diwawancarai dan ditanya bagaimana pemaknaannya terhadap tradisi manyanggar itu sendiri. Secara jelas ia mengemukakan pemaknaannya sebagai berikut:

“Ikiy memaknai manyanggar tuh si huange tege are nilai penting. Kilau nilai pentingnya itah saling menghargai antar sesama makhluk samandeyahe, jida boleh menggau semaunya itah tanpa mealang kepentingan makhluk je beken. Ya si huang belum te itah jida boleh egois lawan sombong, nilai kilau te tege si tradisi manyanggar.”

“Kalau menurut Saya, dalam tradisi manyanggar itu ada nilai-nilai yang penting untuk dimaknai. Misal nilai tentang pentingnya saling menghargai dan menghormati antarsesama makhluk Tuhan. Tidak boleh bertindak semaunya sendiri tanpa memerhatikan kepentingan dan keberadaan yang lain, ya dalam hidup ini kita diajarkan untuk tidak boleh egois dan berlaku sombong. Nilai-nilai seperti itu yang dapat kita maknai dari tradisi manyanggar.” (Wawancara, 25 Juni 2018)

Pemaknaan yang lain juga dikemukakan oleh seorang tokoh masyarakat, TI. Ia mengemukakan sebagai berikut:

“Menurut itah te lah uras tradisi tege nilai si huange te, tergantung bentuk budaya te. Menurut itah kilau manyanggartuh semacam ekpresi gagasan menggau kebersamaan antar itah uras si belum yang saling menduhup anatar uleh are. Si huang agama (Islam) te kilau ite kia.”

“Sependek yang Saya ketahui dan pahami ya bahwa setiap tradisi memiliki nilai-nilai tertentu yang disimbolkan dengan banyak bentuk. Kalau menurut saya sih, manyanggar bisa dimaknai sebagai ekspresi untuk menjalin kebersamaan hidup dengan saling menghargai dan menghormati. Agama (Islam) pun mengajarkan hal yang demikian. Hanya saja memang tradisi tersebut sama sekali tidak bisa dikategorikan sebagai tradisi islami.” (Wawancara, 25 Juni 2018)

Pengalaman merupakan salah satu faktor yang bisa memengaruhi cara seseorang dalam memaknai sesuatu, termasuk mengenai tradisi atau budaya lokal. Hal itu pula yang tergambar dari penjelasan Sf ketika diwawancarai terkait pemaknaannya terhadap tradisi manyanggar. Ia mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Ikiy memaknai manyanggar tuh si huange tege penghormatan gagasan uluh batuh, lawan belum te manusia tuh jida kawa mengandalakan akan itah beh. Kilau masalah kesehatan, jida uras kawa disembuhkan menggau cara dokter. Nah makanya ite tradisi itah te bisa digau atawa diawi ritual adat. Itu nang itah lakukan.”

“Manyanggar itu saya maknai sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Dan dalam hidup ini manusia tidak bisa sepenuhnya mengandalkan akal dan rasionalitasnya sendiri. misal masalah kesehatan, tidak semua bisa disembuhkan dengan cara-cara medis. Makanya dalam hal-hal tertentu pendekatan lain bisa dicoba seperti dengan melakukan ritual adat atau budaya. Itu yang kami lakukan dan kami memercayai itu.” (Wawancara, 25 Juni 2018)

Agama dan budaya seringkali dipandang diametral atau berlawanan. Tidak setiap budaya atau tradisi lokal mengusung nilai-nilai agama (Islam). Bahkan budaya atau tradisi lokal yang sering dilestarikan oleh masyarakat setempat justru dianggap memuat unsur-unsur yang dapat

merusak tauhid. Hal itu juga dinyatakan secara jelas oleh AG, seorang agamawan muslim. Ia mengemukakan pemaknaannya tentang tradisi manyanggar sebagai berikut:

“Andau tuh iki ditanya manyanggar, maka iki meanggap budaya itah tuh sebagai salah ije bentuk ritual budaya je tege syirik menurut agama iki Islam. Si huang islam jidada bentuk budaya je tege unsur syirik si huange te”

“Ya kalau Saya ditanya bagaimana saya memaknai tradisi manyanggar, saya hanya memaknainya sebagai salah satu bentuk ritual budaya yang mengusung kesyirikan. Dan Islam sendiri dengan tegas menolak segala bentuk praktik budaya yang mengusung kesyirikan.” (Wawancara, 24 Juni 2018)

Sementara itu, bagi EG, seorang damang Desa Hajak, tradisi atau budaya lokal seperti manyanggar dimaknainya sebagai perwujudan hubungan yang harmonis baik dengan sesama manusia maupun dengan alam serta makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Hal itu tercermin dari sejumlah bahan-bahan yang digunakan dalam prosesi manyanggar. Prosesi manyanggar sesungguhnya dapat dimaknai sebagai suatu proses komunikasi simbolik. Ia mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

“Tradisi atawa budaya itah te beken jidada makna si huange, kilau mayanggar, tradisi te sesungguhnya si huang pelaksanaannya te mehapa atawa menggau makna-makna tertentu yang bisa dialang dari bahan yang disiapkan. Hanya sebagian uluh jidada mealang jauh kilau itah. Acara manyanggar te diawi gasan mahibur beh, kilau si manyanggar te tege batuping lawan bawayang. Nah acara kilau iki te nampak kaya hiburan beh, padahal si suang acara manyanggar te tege pesan-pesan moral lawan kearifan lokal itah”.

“Tradisi atau budaya dilaksanakan bukan tanpa makna di dalamnya. Seperti manyanggar, tradisi ini sesungguhnya dalam pelaksanaannya membawa makna-makna tertentu yang itu bisa dilihat dari sejumlah bahan yang disiapkan sebelum pelaksanaan maupun ketika prosesi itu berlangsung. Hanya saja bagi sebagian (besar) orang, melihatnya tidak sejauh itu. Umumnya hanya melihatnya sebagai sebuah acara yang dianggap dapat menghibur. Misal dalam prosesi manyanggar biasanya dilaksanakan pula

kegiatan *betoping* atau *bawayang*. Nah ini cenderung dimaknai hanya sebatas hiburan, padahal sebenarnya ada pesan-pesan moral atau kearifan lokal di baliknya.” (Wawancara, 15 September 2018).

Dari sejumlah pandangan atau pemaknaan para informan, suatu objek (tradisi manyanggar) pada dasarnya dimaknai atau diinterpretasi sesuai dengan kerangka atau bidang acuan dari sang pemberi makna itu sendiri. Oleh karena itu, makna yang dihasilkannya pun tidak bersifat tunggal. Makna lahir dari sebuah proses interaksi tertentu.

Dalam konteks tradisi atau budaya manyanggar, makna yang tercipta dari proses interaksi antarindividu dan individu dengan objek (tradisi manyanggar) menghasilkan satu pandangan akan arti pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi atau budaya lokal.

Keberagaman merupakan fakta empiris yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keberagaman dengan segala aspeknya menunjukkan bangsa Indonesia sesungguhnya adalah bangsa yang besar. Keberagaman tersebut di satu sisi merupakan kekayaan tersendiri bagi negara yang berdasarkan Pancasila dengan falsafah *Bhinneka Tunggal Ika*, tetapi di sisi lain juga merupakan potensi bagi terjadinya konflik bernuansa primordial seperti kesukuan, agama, ras, atau antargolongan.

Sejarah panjang Republik Indonesia telah memberikan rekaman kelam bagaimana sejumlah konflik sosial pernah terjadi dan menelan banyak korban jiwa dan juga korban material, termasuk konflik yang terjadi di daerah Kalimantan sendiri, di antaranya konflik Sambas dan konflik Sampit. Sejumlah konflik yang terjadi di sejumlah daerah pun dapat diselesaikan baik melalui pendekatan penegakan hukum positif maupun pendekatan budaya lokal atau tradisi yang sering diistilahkan atau disebut dengan kearifan lokal.⁴³

Kearifan lokal (*local wisdom*) sudah lama dimiliki oleh masyarakat. Kearifan lokal tumbuh dan berkembang dari generasi ke generasi secara

⁴³ Ada sejumlah definisi seputar apa yang dimaksud dengan kearifan lokal itu sendiri. Kearifan lokal diartikan sebagai kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada saat atau waktu kedua kebudayaan tersebut berhubungan. Lihat Citra Smara Dewi, *Representasi Kearifan Lokal pada Lukisan Borobudur dan Bedaya Ketawang Karya Srihadi Soedarsono*, Jakarta: IKJ, 2013, hal. 67. Pengertian lain dari kearifan lokal secara umum adalah kebenaran yang telah mentradisi atau *ajeg* dalam suatu daerah. Lihat Indiwani Seto Wahyu Wibowo, *Kearifan Lokal dalam Film di Timur Matahari*, Tangerang: Universitas Multimedia Nusantara, 2012, hal. 1064.

turun-temurun. Manusia menciptakan budaya, termasuk di dalamnya kearifan lokal dan lingkungan sosial mereka sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan fisik dan biologisnya berupa kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, praktik-praktik sosial, dan lainnya.

Pendekatan budaya atau tradisi sebagai bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat atau etnik pun diakui dapat dijadikan sarana penyelesaian konflik yang penting dan efektif. Jamak dipercayai bahwa budaya atau tradisi lokal merupakan warisan leluhur atau nenek moyang yang sesungguhnya memiliki atau mengandung nilai-nilai luhur yang patut untuk dilestarikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mempercayainya.

Dalam banyak kasus, seiring dengan dinamika dan kemajuan zaman, keberadaan tradisi atau budaya lokal sudah mulai dilupakan atau bahkan ditinggalkan karena dianggap atau dipandang kurang atau tidak relevan lagi dengan gerak kemajuan masyarakat. Dampak nyata yang dirasakan dari arus modernisasi dan globalisasi adalah perubahan cara berpikir masyarakat.

Perubahan pola pikir masyarakat diakui atau tidak sesungguhnya merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi keberlangsungan hidup sebuah tradisi atau budaya. Padahal seperti apa yang dikemukakan oleh WS Rendra, tradisi semestinya tidak (lagi) dilihat sebagai produk masa lalu. Tradisi sejatinya bukan hanya milik masa lalu, melainkan juga milik masa kini dan masa depan. Dengan demikian, tradisi memiliki sifat untuk diciptakan, dan diciptakan kembali, mungkin secara berulang-ulang, apabila keadaan memang membutuhkannya.

Dengan pemahaman seperti itu, tradisi manyanggar yang dilaksanakan oleh masyarakat etnik Dayak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara menjadi relevan. Dengan kata lain, masyarakat etnik Dayak di daerah tersebut menempatkan tradisi manyanggar sebagai kebutuhan dalam rangka menjawab atau menyelesaikan masalah kehidupan yang mereka hadapi, termasuk dalam menyikapi terjadinya konflik di masyarakatnya.

Menurut Rendra seperti dikutip oleh Sobary, tradisi itu sesungguhnya bukanlah objek yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula. Seorang cendekiawan muslim, Hasan Hanafi, memiliki pandangannya sendiri tentang apa yang dimaknainya sebagai tradisi. Menurutnya:

”Tradisi-lah yang menentukan bagaimana mereka harus mengonsepsikan alam. Bahkan, tradisi-lah yang jauh lebih nyata daripada masa kini itu sendiri, sebab kehadirannya bersifat spiritual dan material, abstrak dan sekaligus konkret.”⁴⁴

Upaya merevitalisasi budaya lokal sebagai manifestasi kearifan lokal dalam menyelesaikan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk konflik, dilakukan oleh pemerintah dan bahkan dikuatkan melalui peraturan hukum atau perundang-undangan. Pasal 9 poin (g) UU No. 7 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal.” Dalam Pasal 37 ayat 2 UU tersebut juga tertulis secara eksplisit bahwa rekonsiliasi konflik dapat dilakukan dengan Pranata Adat.

Mendasari pada UU tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah. Salah satu bentuk penerjemahan dari regulasi tersebut adalah dibentuknya Dewan Adat Dayak (DAD) mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten. Dengan demikian, mengembalikan atau menghidupkan (kembali) budaya atau tradisi lokal sesungguhnya telah menjadi program pemerintah sekaligus bentuk apresiasi atas warisan dari para leluhur.

Tradisi manyanggar sebagai tradisi yang dimiliki oleh masyarakat etnik Dayak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Muara Teweh, Kalimantan Tengah juga merupakan kekayaan budaya yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Meskipun bagi sebagian masyarakat etnik Dayak sendiri, barangkali eksistensinya dianggap sudah mulai terlupakan seiring dengan perubahan cara berpikir masyarakat akibat arus modernisasi dan globalisasi jaman.

Dewan Adat Dayak (DAD) dan pemerintah kabupaten juga terus mengampanyekan pentingnya pelestarian budaya atau tradisi lokal melalui beragam cara. Salah satunya dengan menggelar *event* atau kegiatan tahunan Festival Budaya Iye Mulik. Festival budaya ini diadakan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Barito Utara.

⁴⁴ Mohamad Sobary, *Perlawanan Politik dan Puitik Petani Tembakau Temanggung*, Jakarta: KPG, 2016, hal. 56.

Pentingnya pelestarian budaya lokal secara umum juga tergambar dari penjelasan sejumlah informan kunci dengan beragam latar belakang sosial. Mereka memberikan pemaknaan atas budaya lokal (tradisi manyanggar) sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Dengan kata lain, kerangka acuan seseorang sesungguhnya memengaruhi cara pandang dan cara memaknai atas realitas dunia.

Menurut Stephen P. Robbin, seseorang memersepsikan sesuatu (objek) sebenarnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti faktor yang berada dalam diri yang memersepsikan (*perceiver*) di antaranya *attitude*, *motive*, *interest*, *experience*, dan *expectation*.⁴⁵ Pemaknaan para informan atas tradisi manyanggar pun dengan demikian juga dipengaruhi oleh kelima faktor tersebut.

Bagi masyarakat etnik Dayak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, tradisi manyanggar yang dilakukan atau diselenggarakan juga dimaknai sebagai manifestasi dari proses komunikasi simbolik. Misal salah satu kegiatan yang tersaji dalam rangkaian acara manyanggar adalah pentas *betoping* (bewayang).

Acara *betoping* biasanya menceritakan tentang kehidupan manusia yang selalu dihadapkan pada dua pilihan, yakni baik dan buruk. Acara *betoping* dihadirkan sebagai sarana penyampai pesan kepada setiap orang bahwa kehidupan yang benar adalah kehidupan yang senantiasa mengutamakan kejujuran dan kebaikan. Dalam *betoping* ini ada tokoh-tokoh tertentu yang menampilkan karakter-karakter tertentu.

Selain kegiatan *betoping*, dalam penyelenggaraan tradisi manyanggar juga dirangkai dengan acara yang lain sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah informan baik dari Dewan Adat Dayak (DAD) maupun tokoh budaya setempat. Sejumlah rangkaian acara dalam penyelenggaraan tradisi manyanggar juga menghadirkan bentuk-bentuk komunikasi simbolik yang di dalamnya merepresentasikan makna-makna tertentu.

Tidak semua masyarakat Dayak memandang penting tradisi manyanggar, terutama ketika tradisi tersebut dilihat dari perspektif ajaran agama (Islam). Persoalan relasi budaya dan agama di banyak tempat memang seringkali dipandang sebagai dua hal yang berseberangan. Terlebih jika tradisi atau budaya lokal tersebut dianggap tidak memuat nilai-nilai ajaran agama (Islam) yang mereka yakini.

⁴⁵ Stephen P. Robbin. *Organization Theory: Structure, Design, and Applications*, (Penj. Hadyana Pujaatmaka dan Benyamin Molan). Jakarta: Prenhallindo, 2006, hal. 73.

Dalam tradisi manyanggar ini, pandangan seperti itu terpotret dengan jelas. Bagi masyarakat etnik Dayak yang kebetulan sudah beragama Islam (muslim), tradisi manyanggar dipandang jauh dari nilai-nilai keislaman, meskipun mereka mengetahui bahwa tradisi itu merupakan warisan leluhur nenek moyangnya. Berangkat dari kesadaran dan keyakinan religiositas mereka itulah, tradisi manyanggar tidak dianggap sebagai tradisi atau budaya islami. Bahkan tradisi tersebut justru dipandang kental dengan nilai-nilai animisme dan dinamisme. Dua paham kepercayaan yang justru bertolak belakang dengan ajaran agama (Islam) yang utama, yakni ketauhidan (akidah). Tidak heran jika sebagian etnik Dayak yang beragama Islam di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Muara Teweh, tidak lagi memandang tradisi tersebut sebagai sesuatu yang penting untuk dilestarikan.

Penutup

Tradisi atau budaya lokal yang memuat nilai-nilai kearifan lokal pada dasarnya penting untuk terus dilestarikan. Tradisi manyanggar sebagai salah satu budaya masyarakat Dayak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, khususnya di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, juga dipandang penting untuk dijaga dan dilestarikan. Bagi masyarakat Dayak di wilayah Kabupaten Barito Utara ini, tradisi manyanggar masih dijaga dan dilestarikan keberadaannya karena mereka memercayai dan meyakini bahwa tradisi tersebut tidak sekadar warisan leluhur nenek moyang, tetapi dalam tradisi tersebut juga mengandung nilai-nilai kehidupan yang sampai kapan pun relevan dan berguna bagi kehidupan manusia.

Tradisi manyanggar bagi masyarakat etnik Dayak yang tinggal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Muara Teweh, juga dapat dijadikan sebagai medium resolusi dan rekonsiliasi konflik di masyarakat. Pendekatan budaya lokal dalam menyelesaikan masalah konflik sosial dipercaya dan diyakini oleh mereka jauh lebih efektif ketimbang dengan mengedepankan penyelesaian melalui jalur hukum formal.

Dalam pandangan masyarakat Dayak sendiri, tradisi atau budaya lokal memiliki kekuatan tersendiri untuk mengeratkan dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di masyarakat yang pada realitanya multikultur, multibahasa, multiagama, dan multietnik. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk atau manifestasi komunikasi simbolik yang sarat makna di dalamnya. Simbol-simbol tertentu yang ada dalam tradisi

ini dimaknai sebagai representasi makna-makna luhur dari kearifan lokal masyarakatnya.

Sejumlah hal penting yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi keberlangsungan dan pelestarian tradisi (kearifan lokal) perlu ditawarkan, antara lain pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara perlu mengidentifikasi sejumlah kearifan lokal yang penting untuk dilestarikan melalui unit pelaksana teknis seperti Dinas Budaya dan Pariwisata sehingga kekayaan budaya lokal sebagai warisan nenek moyang atau leluhur dapat terdokumentasikan dan dapat dijadikan sebagai sumber bacaan bagi masyarakat. Perlunya penelitian lanjutan tentang pemetaan konflik sosial di wilayah Kabupaten Barito Utara serta perlunya sinergi dan kemitraan antara Perguruan Tinggi seperti IAIN Palangkaraya dengan pemerintah kabupaten di bidang penelitian.

Daftar Pustaka

- Afif, M.A. 2013. *Pemetaan Resolusi Konflik di Lampung*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan.
- Blumer, H. 1968. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Budimansyah, D. 2009. Pembelajaran Kesadaran Multikultural. Dalam *Memelihara Kerukunan Melalui Pendidikan Multikultural*. Disunting oleh Fuad A. hamied dan Syihabuddin. Jakarta: Kedeputian Menkokesra.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara. 2018. *Barito Utara Dalam Angka*. Barito Utara: BPS.
- Danandjaja, J. 1997. *Folklor Indonesia; Ilmu Gosip, Dongeng dan lain-lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Dewi, C.S. 2013. *Representasi Kearifan Lokal pada Lukisan Borobudur dan Bedaya Ketawang Karya Srihadi Soedarsono*. Jakarta: IKJ.
- Eliade, M. 2002. *Mitos Gerakan Kembali Yang Abadi: Kosmos dan Sejarah (The Myth of the Eternal or Cosmos and History)*. Diterjemahkan oleh Cuk Ananta. Yogyakarta: Ikon Teralitera.
- Ewing, A.C. 2003. *Persoalan-persoalan Mendasar Filsafat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fisher, S., Abdi, J., Ludin, R., Smith, S. & William, S. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Diterjemahkan oleh Tim SMK Grafika Desa Putra. Jakarta: SMK Grafika Desa Putra.
- Hall, S. *et al.* (Eds.). 1980. *Culture, Media, Language*. London: Hutchinson.
- Hendricks, W. 2004. *Bagaimana Mengelola Konflik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail, F. 2012. *Republik Bhinneka Tunggal Ika*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Kementerian Agama RI.

- Ife, J. 2014. *Community Development. Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jacobus, E.F. & Kanyan, L.C. 1994. *Rumah Betang sebagai Pusat Kebudayaan*. Jakarta: Penerbit Grasindo dan LP3S.
- Kriesberg, L. 1998. *Constructive Conflicts from Escalation to Resolution*. New York: Boulder Rowman and Liffeld Publisher Inc.
- Levi-Strauss, C. 2005. *Antropologi Struktural* (Anthropologie Structurale). Diterjemahkan oleh Ninik Rochani Sjams. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Muhadjir, N. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Maunati, Y. 2004. *Identitas Dayak (Komodifikasi dan Politik Kebudayaan)*. Yogyakarta: LKiS.
- Nurzakiah, A. 2009. *Representasi Maskulinitas*. Jakarta: FIB UI.
- Robbins, S.P. 2006. *Organization Theory: Structure, Design, and Applications*. Diterjemahkan oleh Hadyana Pujaatmaka dan Benyamin Molan. Jakarta: Prenhallindo.
- Pigay, D.N. 2000. *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah konflik Politik di Papua*. Jakarta: Dinamika Daya Andalan.
- P.M. Laksono, et al. (Eds.). 2006. *Pergulatan Identitas Dayak dan Indonesia: Belajar dari Tjilik Riwut*. Yogyakarta: Galang Press.
- Poloma, M.M. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- West, R. & Turner, L.H. 2009. *Pengantar Teori Komunikasi, Analisis dan Aplikasi*. Diterjemahkan oleh Maria Natalia Damayanti Maer. Jakarta: Salemba Humanika.
- Subiantoro, S. 2010. *Antropologi Seni Rupa: Teori, Metode & Contoh Telaah Analitis*. Surakarta: UNS Press.
- Supardan, D. 2011. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. 1992. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sztompka, P. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sobur, A. 2003. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sartini, N.W. 2004. *Menggali Kearifan Lokal Nusantara; Sebuah Kajian Filsafat*. Yogyakarta: UGM.
- Sobary, M. 2016. *Perlawanan Politik dan Puitik Petani Tembakau Temanggung*. Jakarta: KPG.
- Craig, R.T. & Muller, H.L. 2007. *Theorizing Communication, Readings Across Traditions*. USA: Sage Publications.
- Widjono, R.H. 1998. *Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok*. Jakarta: Grasindo.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wahyu Wibowo, I.S. 2012. *Kearifan Lokal dalam Film di Timur Matahari*. Tangerang: Universitas Multimedia Nusantara.

- Nugrahaningsih, Y. 2013. *Proses Komunikasi Masyarakat Dayak Ngaju Dalam Rangka Melestarikan Nilai-Nilai Hidup Huma Betang, Studi di Lingkungan Masyarakat Dayak Ngaju di Desa Buntoi*. (Tesis). Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Yasip. 2017. Representasi Kearifan Lokal Dalam Babad Tulung Agung. *Acta Diurna*, 13(1).
- Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial. UU No. 7 Tahun 2012.